

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan seksual, utamanya pemerkosaan, meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 kasus yang dilaporkan adalah 293.22 kasus. Tahun 2015 terdapat 16.217 kasus. Tahun 2016 terdapat 326.742 kasus sedangkan tahun 2017 terdapat 259.150 kasus. Data dari Komnas Perempuan juga menyebutkan antara tahun 1998-2010 jumlah kekerasan seksual mencapai 22.284 kasus. Dengan demikian, di Indonesia rata-rata dalam sehari terjadi 12 kali pemerkosaan. Artinya, Indonesia berada dalam darurat kekerasan seksual.

Di Jawa Tengah, kekerasan seksual yang terjadi didominasi oleh pemerkosaan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan *Legal Resources Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 2016 kekerasan terhadap perempuan jumlahnya mencapai 871 kasus yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jateng dengan kasus pemerkosaan sebanyak 144 atau 29,3 persen. Pelakunya biasanya adalah orang terdekat yang kenal dengan korban.

Daerah dengan kasus pemerkosaan tertinggi adalah di Kota Semarang dengan 33 kasus. Kabupaten Boyolali 15 kasus dan Wonogiri 12 kasus. Data LRC-KJHAM pada periode Januari sampai Februari 2017 mencatat sudah ada 58 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah dengan kasus pemerkosaan sebanyak 12 kasus atau 6,96 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih tergolong tinggi sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Pada kenyataannya, data tersebut tidak mewakili jumlah seluruh korban kekerasan seksual. Survei yang dilakukan Lentera Sintas Indonesia, Majalah Magdalene dan situs petisi online *Change.org* menyatakan bahwa 90 persen korban pemerkosaan di Indonesia bungkam karena rasa malu akan tekanan sosial.

Rasa malu tersebut semakin diperkuat dengan pemberitaan kekerasan terhadap perempuan yang menyalahkan korban (*blaming the victim*) yang mengarah pada sadisme seksual. Penyebaran informasi pemerkosaan menjadi vulgar dengan dramatisasi situasi yang justru menyudutkan dan membuat malu korban. Banyak pemberitaan di media massa menggiring masyarakat untuk lebih menyalahkan korban pemerkosaan dan berempati pada pelaku yang berdalih tak mampu menahan gairah seksualnya karena ada perempuan berdiri sendirian di tengah malam menunggu kendaraan umum.

Pemilihan diksi pemberitaan juga seringkali semakin membuat malu korban pemerkosaan. Penelitian mengenai pemberitaan pemerkosaan pernah dilakukan oleh Winarko (2000: 50). Ia meneliti mengenai pemberitaan pada surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dan *Suara Merdeka*, ditemukan 22 kata yang digunakan untuk menggantikan kata “pemukosaan”, yaitu: (1) merenggut kegadisan, (2) mencabuli, (3) menggauli, (4) menggagahi, (5) menakali, (6) dianui, (7) dikumpuli, (8) menipu luar dalam, (9) digilir, (10) dinodai, (11) digarap, (12) dihamili, (13) korban cinta paksa, (14) dipaksa berhubungan intim, (15) berbuat

tidak senonoh, (16) memaksa bersetubuh, (17) korban kuda-kudaan, (18) memaksa memenuhi nafsu birahi, (19) dipaksa melayani, (20) melakukan perbuatan asusila, (21) digelandang, dan (20) dipaksa melakukan permainan ibu-ibuan. Pilihan atau pemakaian istilah tersebut jelas akan menimbulkan bias dan semakin mempermalukan korban pemerkosaan.

Ironisnya, setelah 17 tahun berselang, pemberitaan pemerkosaan di media massa masih bias gender. Bahkan, semakin parah karena berani menyalahkan korbannya.

Sebagai contohnya adalah berita dari *Detiknews.com* yang diunggah pada Senin, 16 Feb 2015 pukul 15:13 WIB, berjudul, “Penganiayaan Brutal Siswi SMA di Bantul Ternyata Didasari Tato Hello Kitty”. *Lead* beritanya adalah sebagai berikut:

“Bantul - LA (18), siswi-siswi SMA di Yogyakarta menjadi korban penyekapan dan penyiksaan. Selain dipukuli dan disundut rokok, dia juga' dianiaya' di bagian kemaluannya. Aksi brutal yang dilakukan 9 siswi (sebelumnya ditulis 8) orang ini dilatarbelakangi persoalan tato.”

Berita tersebut, mengungkap kronologi kejadian dengan detail yang kemudian menggiring pembaca membayangkan secara runut peristiwa biadab yang “menyakitkan,” menempatkan korban untuk ditelanjangi berkali-kali oleh media dan ribuan pembacanya. Selain itu, berita tersebut justru menyalahkan korban yang mengalami kekerasan seksual karena mempunyai tato *Hello Kitty*. *Blaming the victim* yang diarahkan kepada korban menimbulkan reviktimisasi. Reviktimisasi artinya korban kembali diperkosa melalui pemberitaan media karena berulang kali mengingatkannya pada peristiwa traumatis yang menyimpannya dan menyalahkannya atas terjadinya peristiwa tersebut.

Contoh lain berita yang mempersalahkan korban adalah berita dari *Sindonews.com*, yang ditulis oleh Frans Marbun yang diunggah pada Selasa, 1 Maret 2016, berjudul “Pakai Rok Mini, kesucian Karyawan Cantik Hampir Hilang di Lift.” Berikut potongan beritanya:

“Diduga, pelaku yang tak tahan melihat kemolekan tubuh korban, langsung memeluknya (korban) dari belakang, kemudian menciuminya. Apalagi, korban mengenakan pakaian seksi dengan rok mini di atas lutut dan ketat.”

Berita tersebut mengindikasikan bahwa pakaian seksi dan rok mini yang dikenakan perempuan seolah menjadi pembenaran bagi pelaku yang memerkosanya. Ironisnya, pelaku justru dibela dan memperoleh empati dari berbagai pihak, termasuk media massa.

Anggapan perempuan sebagai sumber penggoda pemerkosaan terjadi hampir di seluruh negeri, misalnya di India. Kementerian Pariwisata India mengeluarkan peringatan terhadap turis perempuan untuk tidak memakai rok mini saat mengunjungi kota atau desa di negara itu untuk menghindari pemerkosaan, sebagaimana dilansir *BangkaPos.com*.

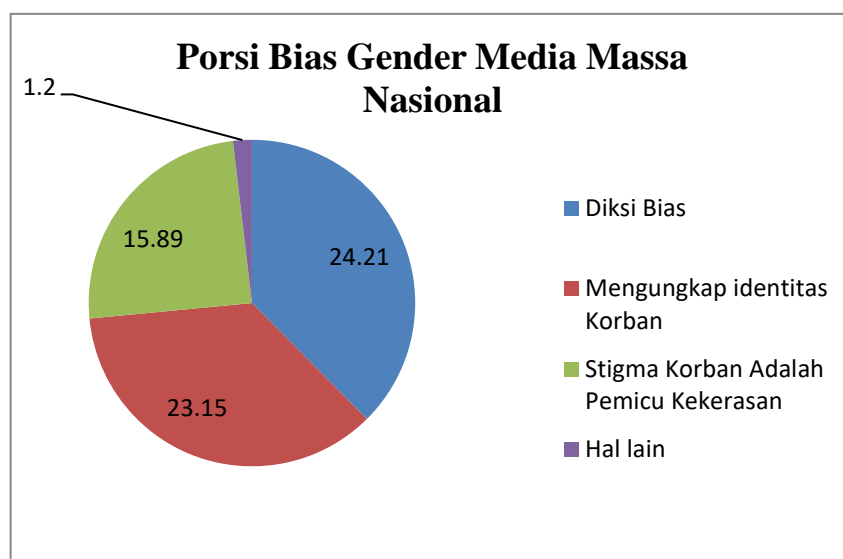
Di Indonesia, Pejabat pemerintah juga turut menyalahkan korban atas peristiwa pemerkosaan yang telah terjadi, sebagaimana dinyatakan oleh Fauzi Bowo ketika marak terjadi pemerkosaan di transportasi umum di Jakarta tahun 2011. Fauzi Bowo, selaku Gubernur Jakarta kala itu justru membela pelaku pemerkosaan dengan mengatakan,

“Bayangkan saja kalau orang naik mikrolet duduknya pakai rok mini, kan agak gerah juga. Sama kayak orang naik motor, pakai celana pendek, ketat lagi, itu yang dibelakangnya bisa goyang-goyang,” ujarnya sebagaimana dilansir *JPNN.com* pada 16 September 2011.

Dari pemaparan berbagai pemberitaan media tersebut, semuanya menggambarkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual di media massa disoroti sebagai sumber penggoda. Perempuan dituding menimbulkan gairah laki-laki yang melihatnya sehingga pantas disalahkan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya.

Pada tingkat nasional, berdasarkan data dari Komnas Perempuan tahun 2015, disebutkan bahwa pemberitaan media massa mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak sensitif gender. Komnas perempuan meneliti 9 media yakni: *Indo Pos*, *Jakarta Post*, *Jakarta Globe*, *Kompas*, *Koran Sindo*, *Pos Kota*, *Republika*, *Koran Tempo* dan *Media Indonesia*. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa secara umum, media-media tersebut tidak sensitif gender dalam hal: menggunakan diksi yang bias (24,21%), mengungkap identitas korban (23,15%), stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan atau *blaming the victim* (15,89%). Apabila digambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Sumber: Komnas Perempuan 2015



Tingginya kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah harusnya memang mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama media massa yang umumnya digunakan sebagai kaca mata oleh pembacanya untuk melihat “realita.”

Namun, pada kenyatannya, praktik jurnalisme sensitif gender masih belum banyak diterapkan oleh media massa. *Suaramerdeka.com* sebagai salah satu media online lokal di Jawa Tengah diharapkan mampu membuat berita sensitif gender sehingga tidak memicu pembaca menyalahkan korban pemerkosaan dan menyadarkan seluruh masyarakat untuk menekan angka pemerkosaan. Namun, *Suaramerdeka.com* justru turut mengasikkan berita pemerkosaan dengan sudut pandang *blaming the victim*..

Misalnya saja pada berita yang tayang di *Suaramerdeka.com* tertanggal 1 Juni 2016, berjudul “Kasus Dugaan Pemerkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih Dalam.” *Lead* dan potongan beritanya adalah sebagai berikut:

“SEMARANG, suaramerdeka.com – Perlu digali lagi apakah kasus dugaan pemerkosaan kepada anak di bawah umur yang dialami PL (12) di daerah Plamongan Kota Semarang, murni pemerkosaan atau ada unsur lainnya.”

“Anak masih labil, akan mencoba menggali lagi. Jika suka sama suka, seperti apa. Saya masih perlu waktu untuk bersama-sama psikolog menggali ada apa sebenarnya. Jika ada.”

Berita tersebut mengindikasikan mempersalahkan korban (*blaming the victim*) yang mencurigai korban tidak diperkosa. Menurut pandangan narasumber berita yang dipilih *Suaramerdeka.com*, ada kemungkinan mereka berhubungan intim karena suka sama suka (*sexual consent*).

Konsep *blaming the victim* yang digunakan sebagai sudut pandang pemberitaan bisa dilihat sebagai kekerasan simbolik yang ditujukan pada korban kekerasan. Dari sudut pandang gender, hal ini tentu saja merupakan ketidakadilan.

Sejatinya, kekerasan terhadap perempuan, utamanya pemerkosaan, melibatkan rasa hormat dan kesetaraan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kausar Rafika Sari tahun 2013 menyebutkan, dampak psikologis yang dialami oleh korban pemerkosaan adalah mengalami kejadian traumatik yang dialami kembali. Ironisnya, justru banyak pemberitaan kasus pemerkosaan yang justru ‘memerkosa’ korban kembali dengan mengulang kronologi kejadian secara rinci serta mempersalahkan korban (*blaming the victim*).

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa sebagian besar pemberitaan di media massa menyalahkan korban terhadap peristiwa traumatik tersebut. Mengingat besarnya angka kekerasan seksual di Jawa Tengah dan pemberitaan yang menyalahkan korban memiliki potensi merusak psikologis korban sehingga memiliki efek yang besar, maka penelitian ini fokus pada berita kekerasan seksual yang menyalahkan korban pada media online lokal berbasis media cetak pertama di Indonesia, *Suaramerdeka.com*.

Adapun definisi kekerasan seksual dapat meliputi upaya dan atau pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman menggunakan kekuatan, serta ancaman pemerkosaan (Fisher et al, 2000: WHO, 2002).

Kekerasan seksual utamanya selalu ditujukan kepada perempuan sebagaimana termaktub dalam *Convention on the Elimination of all Forms of*

Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Rekomendasi Umum Nomor 19

Tahun 1992 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyatakan:

“Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki....Tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan.”

Kemudian, apabila merujuk pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 deklarasi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.

Sedangkan definisi pemerkosaan secara khusus, menurut Statuta Roma adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksualitas, seringnya apapun, dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun benda-benda lainnya. Serangan ini dilakukan dengan pemaksaan atau menyerang seseorang yang tidak mampu memberikan ketidaksetujuan yang sesungguhnya (Statuta Roma, 2016: 107).

Selanjutnya, arti penting pemberitaan secara berimbang dan berkeadilan gender terdapat pada pasal 28-I (Ayat 1 dan 2) UUD 1945. Selain itu,

ketidakadilan representasi perempuan di media bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai landasan moral dan etika profesi wartawan pada Pasal 1. Selanjutnya, pada Pasal 2, terdapat kewajiban bahwa wartawan harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara. Selain itu, pada Pasal 4, disebutkan bahwa wartawan tidak diperkenankan cabul. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Selain itu pada Pasal 8 juga menyatakan pelarangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Setelah dicermati, di Jawa Tengah, khususnya Semarang, banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus pemerkosaan. *Suaramerdeka.com* sebagai koran lokal di Jawa Tengah dipilih dalam penelitian ini terkait konsep *blaming the victim* pada berita pemerkosaan. Sudut pandang *blaming the victim* pada berita pemerkosaan yang lolos ke *Suaramerdeka.com* pastilah terkait erat dengan kebijakan redaksinya.

Kebijakan redaksi menjadi dasar pertimbangan media sebagai penentu berita apa saja yang akan dimunculkan dan tidak dimunculkan. Penentuan berita ini terkait dengan proses struktur yang mempengaruhi kebijakan yang diambil dalam media tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Kasus kekerasan terhadap perempuan utamanya pemerkosaan di Semarang adalah yang tertinggi di Jawa Tengah. Peristiwa tersebut banyak diberitakan oleh koran

lokal setempat. Ironisnya, banyak pemberitaan yang justru menimpakan kesalahan kepada korban (*blaming the victim*) sehingga menambah trauma bagi korban dan menggiring masyarakat (pembaca) untuk ikut menyalahkan korban.

Untuk itu, permasalahan yang akan dimunculkan dari penelitian ini adalah: Bagaimana gambaran *blaming the victim* pada berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com*? Bagaimana kebijakan *Suaramerdeka.com* terkait penayangan berita *blaming the victim*?

Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada bagaimana kebijakan *Suaramerdeka.com* dan struktur yang beroperasi di dalamnya berperan menghasilkan berita kekerasan seksual yang justru menyalahkan korban dan bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dengan demikian, penelitian kebijakan yang akan dilakukan adalah melakukan analisa kritis terhadap pemberitaan kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com* dengan unsur *blaming the victim* yang melakukan peminggiran (alienasi) terhadap korban pemerkosaan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan kekerasan simbolik berupa *blaming the victim*; (2) mendeskripsikan *blaming the victim* berupa alienasi korban kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com*; (3) mendeskripsikan kebijakan *Suaramerdeka.com* terkait *blaming the victim*; (4) mendeskripsikan beroperasinya ideologi dominan dibalik kebijakan *Suaramerdeka.com* terkait *blaming the victim*.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan secara akademis. Penelitian yang saat ini dilakukan merupakan penelitian kebijakan yang melakukan analisa kritis terhadap pemberitaan kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* yang melakukan peminggiran (alienasi) terhadap korban pemerkosaan. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini karena adanya analisis sensitivitas gender kebijakan industri media massa yang melakukan praktik *blaming the victim* berupa alienasi gender korban kekerasan seksual pada berita yang diproduksi dan direproduksi.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada media massa, utamanya media online. Media massa apabila dilihat sebagai agen perubahan, sebenarnya bisa mengusahakan nilai-nilai kesetaraan gender di masyarakat, bukan sekadar penyedia berita dramatis bagi pembaca.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat agar lebih kritis menyikapi berita kekerasan seksual di media massa yang justru membela pelaku dan malah menyalahkan korban. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran gender bagi pembaca berita kekerasan seksual di media.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Asumsi yang mendasari digunakannya paradigma ini adalah bahwa ketidakadilan gender merupakan hal yang diperjuangkan oleh penganut paradigma ini.

Unsur “kritis” pada paradigma ini adalah mempertanyakan relasi kekuasaan yang timpang sehingga mengakibatkan dominasi dalam proses komunikasi. Dengan demikian, tradisi kritis mencoba mengungkap kondisi sosial yang opresif dan pengaturan kekuasaan yang timpang (asimetris).

Teori-teori kritis dalam tradisi ini berani melontarkan kritik terhadap penguasa atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemakmuran dirinya sendiri. Konsep penting dalam tradisi ini adalah ideologi penguasa mendominasi masyarakat. Perlu adanya penyetaraan agar distribusi kekuasaan bisa seimbang. Teori kritis membela kelompok terpinggirkan. Dalam ranah komunikasi, pendekatan kritis secara khusus mengkaji mengenai bagaimana suatu pesan bisa memperkuat opresi di masyarakat.

Paradigma kritis dalam komunikasi menekankan pada struktur sosial yang lebih luas di mana komunikasi massa itu terjadi dan fokus pada isu siapa mengontrol suatu sistem komunikasi (Severin dan Tankard, 2005: 18).

Inti dari tradisi kritis adalah *pertama*, mencari *taken for granted system*, struktur kuasa, kepercayaan atau ideologi yang mendominasi masyarakat. *Kedua*, tradisi kritis mengungkap kondisi sosial dan pengaturan kekuasaan yang opresif

untuk mewujudkan emansipasi atau masyarakat bebas dari penindasan. *Ketiga*, teori-teori kritis memadukan teori dan tindakan (Foss dan Littlejohn, 2008: 46).

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang saat ini dilakukan, komunikasi massa yang terjadi adalah di koran online lokal Jawa Tengah yang fokusnya adalah siapa mengontrol sistem pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di media tersebut. Beberapa berita menyalahkan korban, hal tidak wajar yang coba digali dalam penelitian ini.

Sedangkan menurut Guba & Lincoln (2011), secara filosofis, tiga persoalan mendasar dalam penelitian meliputi (1) aspek *ontology*, yakni mempersoalkan bentuk dan sifat dari realita yang diteliti; (2) aspek *epistemology* yang mempersoalkan hubungan antara peneliti dengan apa yang ditelitinya; (3) sementara dalam aspek *methodology*, mempersoalkan cara bagaimana peneliti dapat menemukan apapun yang ingin diketahuinya.

Secara ontologis, penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang menekankan pada realisme historis. Dalam pendekatan ini, realita diasumsikan bersifat semu dan plastis yang dibentuk oleh kesatuan faktor-faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, dan gender. Faktor-faktor ini selanjutnya dikristalisasikan ke dalam sebuah struktur yang nyata. Bagi pendekatan ini, struktur merupakan realitas historis yang virtual. Paradigma kritis memahami realitas bukan dibentuk oleh alam (*nature*), bukan alami, tetapi dibentuk oleh manusia. Ini tidak berarti setiap orang membentuk realitasnya sendiri-sendiri, tetapi orang yang berada dalam kelompok dominan merupakan pihak yang menciptakan realitas, dengan

memanipulasi, mengondisikan orang lain agar mempunyai penafsiran atas pemaknaan seperti yang mereka inginkan.

Sedang secara epistemologis, paradigma kritis melihat hubungan antara peneliti dan realitas yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu (*transactionalist/subjectivist*). Dalam rangka memahami suatu realitas si peneliti mesti menggunakan perspektif si pelaku (pembentuk) realitas. Realitas harus dipahami sebagai kenyataan yang telah diperantarai oleh nilai-nilai (*value mediated findings*) antara si subyek dengan realitas yang sebenarnya (struktur dominasi media).

Sementara secara metodologis, paradigma kritis bersifat dialogis dan dialektis. Sifat transaksional dari penelitian ini mempersyaratkan sebuah dialog antara peneliti dan subyek-subyek yang diteliti. Dialog itu haruslah bersifat dialektik untuk mengubah ketidaksadaran dan ketidakmengertian ke dalam kesadaran yang lebih diinformasikan (melihat bagaimana struktur-struktur itu bisa diubah dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan itu).

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strukturasi Gender yang masuk ke dalam tradisi kritis. Teori Strukturasi Gender ditempatkan dalam paradigma kritis karena adanya kesadaran melawan hegemoni ideologi gender dominan (Sunarto, 2007: 153).

Selain itu, teori Feminisme Radikal Kultural juga digunakan dalam penelitian ini. Teori Feminisme Radikal Kultural menyatakan bahwa akar dari

ketertindasan perempuan adalah dari struktur patriarki yang menyakiti seksualitas perempuan.

Asumsi yang dibangun adalah bahwa patriarki, yaitu sistem kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat memberikan posisi dominan kepada kaum laki-laki, menyebabkan keterbelakangan kaum perempuan (Sunarto, 2009: 39). Patriarki bukan *taken for granted* sistem, melainkan dibentuk oleh sistem sosial untuk melanggengkan kuasa laki-laki atas perempuan.

1.5.2. State of The Art

1.5.2.1. Penelitian Sunarto (2007): *Kekerasan Televisi Terhadap Wanita: Studi Strukturasi Gender Industri Televisi Dalam Naturalisasi Kekerasan Terhadap Wanita Melalui Program Televisi Untuk Anak-anak di Indonesia.*

Penelitian tersebut mengkaji proses strukturasi media khususnya media televisi, yaitu dengan melihat bentuk-bentuk kekerasan, dominasi, gender, struktur gender dalam praktiknya di institusi media televisi, dan posisi kekerasan atas perempuan dalam proses strukturasi gender di media televisi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan metode Analisis Wacana Kritis dan kajian feminis, yang didukung dengan analisis isi feminis dan etnografi feminis. Hasil penelitian menyatakan, terdapat suatu proses naturalisasi kekerasan atas perempuan melalui program siaran televisi dengan melibatkan struktur gender agen perempuan dan struktur televisi beserta struktur sosial di belakangnya yang bersifat resiprokal.

1.5.2.2. Penelitian Hapsari Dwiningtyas Sulistyani: “Korban dan Kuasa di dalam Kajian Kekerasan terhadap Perempuan”

Penelitian yang dilakukan Hapsari pada tahun 2011 ini merupakan studi gender tentang kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan cara perempuan korban dominasi kekuasaan patriarkal. Penelitian ini mulai melihat potensi perempuan dalam memperoleh kekuasaan dan menantang posisi mereka sebagai korban. Penelitian ini menunjukkan kemungkinan pergeseran perspektif dominan pada studi perempuan dengan cara menjelajahi tulisan perempuan. Menjelajahi tulisan perempuan merupakan salah satu cara mencari titik alternatif pandangan yang mampu menantang dominasi patriarki guna membangun peran sosial perempuan.

1.5.2.3. Penelitian Hyu Sisca dan Clara Moningka (2008): *Resiliensi Perempuan Dewasa Muda yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak.*

Meneliti tentang kemampuan resiliensi anak agar dapat tumbuh kembali rasa percaya dirinya setelah dirusak oleh peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya. Subjek penelitian adalah 3 orang, dua di antaranya memperoleh resiliensi dari lingkungan serta segi spriritual. Sedangkan satu subjek penelitian tidak mengalami resilien karena selalu menyalahkan dirinya sehingga sulit menerima masa lalunya.

1.5.2.4. Penelitian Esra Ozgun Unal, Sermet Koc, Volkan Unal, Ramazan (2016): *Violence Against Women: A Series of Autopsy studies from Istanbul Turkey.*

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya perempuan di Turki yang meninggal karena kekerasan seksual. Data otopsi yang dilakukan dari tahun 2006 hingga 2010 menyatakan korban meninggal mencapai 20.486 jiwa. Hasil penelitian menyatakan kekerasan terhadap perempuan dikarenakan karakteristik budaya patriarkhi di Istanbul.

1.5.2.5. Penelitian Erika M. Redding, Maria Teresa Ruiz-Cantero, Jose Fernandez-Saez, Marta Guijarro-Garvi (2016): *Gender Inequality and Violence Against Woman in Spain, 2006-2014 Towards a Civilized Society.*

Meneliti mengenai hubungan posisi gender asimetris Spanish *Autonomous Communities* (AC) dan relasi hubungan romantis (pacaran) berdasarkan karakteristik sosio-demografi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan sensitif gender mengurangi angka kematian korban kekerasan seksual di Spain.

1.5.2.6. Penelitian Janet Farlow (2017): *Intimate Partner Violence and Woman's Reproductive Health*

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sebanyak 30 persen perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh suami, pacar

dan mantan pacar. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlu disediakan fasilitas kesehatan IPV (*Intimate Partner Violence*) dan disediakan dukungan yang diperlukan bagi korban.

1.5.2.7. Penelitian Silvia Galdi, Anne Maass, dan Mara Cadinu (2014): *Objectifying Media: Their Effect on Gender Role Norms and Sexual Harrasment of Women*

Tipe yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah Riset Eksperimen. Sampel beragam terdiri dari 141 orang laki-laki yang tinggal di Italia Utara, termasuk siswa dan laki-laki yang telah bekerja. Penelitian melakukan eksperimen pada kelompok laki-laki yang terkena paparan tayangan yang mengandung konten obyektifikasi seksual perempuan terhadap kemungkinan peningkatan perilaku melecehkan dan juga eksperimen pada kelompok laki-laki yang tidak mendapat perlakuan sama (mereka diberi paparan konten tayangan yang menggambarkan perempuan dalam peran profesional).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta laki-laki memiliki niat lebih besar untuk terlibat dalam pemaksaan seksual dan cenderung terlibat dalam perilaku melecehkan gender setelah melihat penggambaran tayangan TV tentang perempuan sebagai obyek seksual dibandingkan peserta yang melihat tayangan TV dengan konten tentang perempuan sebagai subyek mandiri dan profesional.

1.5.2.8. Penelitian Eran Shor, Arnout van de Rijt, Alex Miltsov, Vivek Kulkarni, and Steven Skienab (2015): *A Paper Ceiling: Explaining the Persistent Underrepresentation of Women in Printed News*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji beda. Uji beda ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan keterwakilan perempuan di media massa yang dipimpin oleh editor perempuan dibanding editor laki-laki. Penelitian ini melihat fenomena “*glass ceiling*” dalam berita-berita media cetak. Matafora *glass ceiling* (perempuan kompeten tidak bisa mencapai jabatan puncak) menjadi ciri gender realitas pekerjaan di awal abad 21. Tingkat cakupan yang rendah pada surat kabar (yaitu, di antara individu-individu yang sering tampil di media), mengakibatkan stagnasi bagi perempuan untuk berkarir di bidang politik, pemerintahan, manajerial, profesional olahraga, dan posisi eksekutif.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Editor perempuan ternyata juga menutupi keterwakilan perempuan di media. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa surat kabar liberal dan konservatif dengan editor laki-laki maupun perempuan semuanya secara signifikan cenderung menutupi keterwakilan perempuan di media.

1.5.2.9. Penelitian Bettina Spencer (2016): *The Impact of Class and Sexuality-Based Stereotyping on Rape Blame*.

Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan mengetahui pengaruh persepsi tentang kekerasan seksual pada stereotip tentang seksualitas. Partisipan pada penelitian tersebut diminta membaca sebuah skenario arsip polisi yang menggambarkan situasi ketika seorang perempuan dilaporkan diperkosa.

Hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan, partisipan lebih banyak menyalahkan dan menunjukkan lebih banyak sikap negatif terhadap perempuan korban dari kalangan SES rendah. Partisipan juga menilai korban pemerkosaan yang selamat (hidup) dari golongan SES rendah sebagai orang yang menyukai perceraian, dan stereotip ini berkorelasi dengan sikap menyalahkan dan sikap negatif yang dimoderasi oleh tingkat kelas sosial partisipan. Partisipan dengan kelas sosial tinggi mendeskripsikan kejadian pemerkosaan dengan singkat. Partisipan dengan kelas sosial rendah mendeskripsikan kejadian pemerkosaan secara panjang lebar. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kelas sosial berpengaruh secara berbeda dalam membentuk bagaimana seseorang membicarakan mengenai pemerkosaan.

1.5.3.0. Penelitian Nick J. Fox dan Clare Bale (2017): *Bodies, pornography and the circumscription of sexuality: A new materialist study of young people's sexual practices.*

Tipe yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode *New Materialist*. *New Materialist* melihat pengalaman seseorang dengan

kelompok dan juga hubungan mereka dengan badan, benda (material) dan gagasan.

Pengambilan sampel dengan teknik purposif sampling dengan pendekatan *Maximum Variation Sampling*. Pendekatan variasi maksimum diterapkan untuk memperoleh keragaman dalam hal latar belakang sosial dan keluarga, tempat lahir dan sekolah, etnisitas, kepentingan sosial, penampilan fisik dan 'gaya', kemampuan akademik dan mata pelajaran yang diteliti. Selanjutnya, diperoleh informan sebagai berikut: 22 remaja (11 laki-laki dan 11 perempuan) berusia 16-19 tahun. Sementara semua peserta berkuliah di perguruan tinggi yang sama.

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan luasnya berbagai hubungan afektif dalam kumpulan seksualisasi, termasuk keluarga, teman dan teman sebaya; hal-hal materi seperti alkohol, kondom, acara sosial, uang, mobil dan materi pendidikan seks, formasi sosial seperti standar moral, norma dan budaya jalanan, serta elemen istimewa seperti selebritis atau *skateboard*, juga terlibat pada kapasitas seksual, dan karenanya 'seksualitas' dari orang-orang muda ini, muncul dari campuran berbagai hal yang kompleks tersebut.

Hasil penelitian menyatakan, media dan pornografi berkontribusi memengaruhi kemungkinan untuk membuka atau memunculkan seksualitas kaum muda (misalnya, sebagai sumber informasi tentang seksualitas atau sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi kemungkinan sumber kenikmatan seksual).

Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa media dan materi pornografi mengandung konsepsi seksualitas yang sangat sempit. Praktik stereotip dan imajinatif sering dilukiskan di beberapa media pornografi dan seksual secara

bermasalah karena media-media tersebut memaksakan definisi seks dan seksualitas yang sempit dan terbatas: tubuh menjadi formulasi preskriptif gender dan seksualitas. Mereka (para informan) akibatnya mereproduksi dan memperkuat *misogyny*, objektivitas seksual dan konsumerisme seksual neoliberal, serta membatasi tumbuhnya keragaman sudut pandang praktik seksual.

Berdasarkan *state of the art* sepuluh tahun terakhir yang dipaparkan di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan, yakni sama-sama mengkaji mengenai diskriminasi perempuan. Namun, penelitian yang mengkaji mengenai praktik alienasi gender pada penulisan berita *blaming the victim* belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah menganalisa sensitivitas gender kebijakan industri media massa yang melakukan praktik *blaming the victim* berupa alienasi gender korban kekerasan seksual pada berita yang diproduksi dan direproduksi.

1.5.3. Teori Strukturasi Gender

Dalam menjelaskan topik atau isu pada penelitian ini, digunakan pendekatan ekonomi politik kritis dengan strukturasi sebagai *entry point*-nya. Alasan yang mendasarinya, berita kekerasan seksual yang menyalahkan korbannya dipengaruhi agen-agen sebagai bagian dari struktur industri media massa. Agen-agen tersebut terlibat praktik penindasan terhadap perempuan. Penindasan perempuan bersifat struktural dan penyelesaiannya pun hanya akan terjadi apabila ada perubahan struktur kelas (Fakih, 2013: 105).

Adapun definisi struktur adalah aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya dalam suatu lembaga. Suatu lembaga memiliki sifat struktural, ketika hubungan-hubungan antara aktor dalam struktur dimantapkan sepanjang waktu dan di sembarang ruang (Giddens, 2011: xxxix). Ruang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ruang redaksi di *Suaramerdeka.com* yang bersifat struktural.

Dalam menjelaskan struktur yang berkaitan dengan masalah gender, digunakan Teori Strukturasi Gender. Strukturasi Gender adalah teori dari Sunarto, Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro Semarang. Teori Strukturasi Gender adalah perpaduan antara Teori Strukturasi dengan Teori Feminis. Dalam penciptaan Teori Strukturasi gender, Sunarto dipengaruhi oleh pemikiran Anthony Giddens dan Wolffensperger dalam menjelaskan konsep pokok teori tersebut.

Teori Strukturasi Gender mempunyai dua konsep pokok terkait dengan struktur yang digenderkan (*engendered structure*) dan reproduksi ganda (2009: 65-75). Struktur yang digenderkan artinya terjadi dominasi gender dalam struktur manakala struktur signifikansi dan legitimasi memberikan justifikasi terhadap kekuasaan kaum laki-laki atas kaum perempuan melalui mekanisme kursif dan persuasif.

Mekanisme kursif terkait dengan kekerasan simbolik (ideologis) apabila menggunakan istilah Bourdieu. Sedangkan kekerasan simbolik merupakan intimidasi yang dilakukan oleh bahasa (Bourdieu, 1991: 51).

Reproduksi ganda artinya, dalam strukturasi terjadi produksi dan reproduksi sistem sosial melalui penggunaan aturan dan sumber daya aktor dalam interaksi.

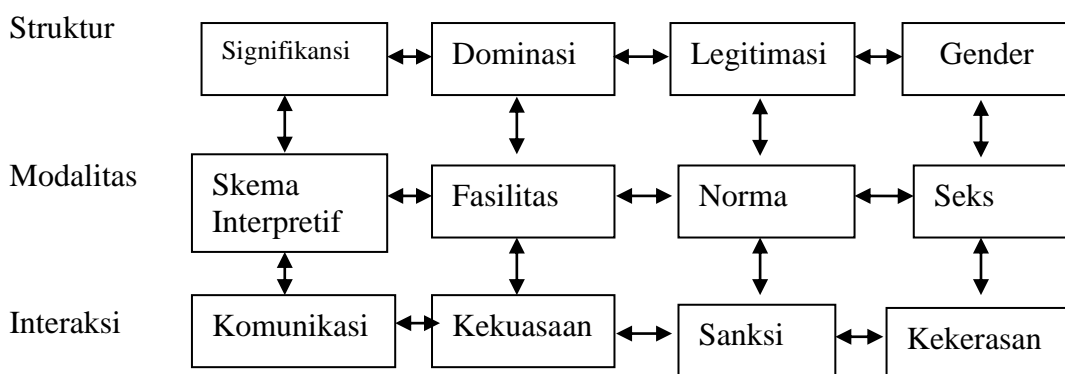
Dalam Strukturasi Gender, dibutuhkan teori feminis untuk menggambarkan ketimpangan gender dalam sebuah struktur. Penelitian ini menggunakan Teori Feminisme Radikal Kultural. Asumsi yang mendasari digunakannya Teori Feminis Radikal dalam penelitian ini adalah bahwa feminis tersebut *concern* terhadap masalah seksualitas perempuan.

Apabila dijabarkan, pendekatan Feminis Radikal masuk dalam teori strukturasi melalui: (1) konsep sistem sosial dengan memberi definisi sistem sosial sebagai relasi gender asimetris yang dipengaruhi patriarkisme; (2) konsep aktor dengan membedakannya menjadi agen laki-laki dan perempuan; (3) konsep interaksi dengan menunjukkan lokasi terjadinya interaksi di ranah domestik dan ranah publik melalui tindakan-tindakan represif terkait seksualitas; (4) konsep aturan melalui pengetahuan tentang sistem tanda dan norma-norma seksualitas; dan (5) konsep sumber daya melalui kekuasaan terkait dengan kepemilikan fasilitas alokatif dan otoritatif yang mendiskriminasikan kaum perempuan dari kepemilikan sumber daya di ranah publik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sunarto. Dalam penelitiannya, Sunarto melihat bahwa kapitalisme bersama-sama dengan patriarkisme (dan misoginisme) merupakan ideologi gender dominan di balik terjadinya konstruksi relasi gender asimetris (sistem sosial) antara aktor laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam penelitian ini, menekankan persoalan seksualitas sebagai akar ketertindasan perempuan. Perempuan disalahkan atas kekerasan seksual yang menimpanya. Tentu saja, sistem patriarkhi dominan memiliki peran besar mencederai seksualitas perempuan.

Seksualitas perempuan diusung oleh Feminisme Radikal Kultural. Gerakan feminisme tersebut menyatakan bahwa hubungan heteroseksual pada umumnya dikarakterisasi dengan ideologi obyektivikasi seksual (laki-laki sebagai subjek/tuan; perempuan sebagai obyek/budak), yang mendukung kekerasan seksual laki-laki terhadap perempuan (Brenner dan Ramas dalam Tong, 2004: 94). Apabila digambarkan, modalitas Struktur Gender melakukan dominasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Modalitas Struktur Gender (Sunarto, 2007: 138)



Mengacu pada pendekatan Feminis Radikal melebur dalam Teori Strukturasi, bagan tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut: Agen perempuan dan laki-laki terlibat produksi dan reproduksi relasi gender asimetris melalui penggunaan aturan semantika dan norma seksualitas (pengetahuan), serta sumber daya alokatif dan otoritatif (kekuasaan) yang dimiliki agen laki-laki dan perempuan dalam interaksi komunikasi dan sanksi yang bersifat represif terhadap kaum perempuan di ranah domestik dan publik untuk menciptakan struktur dominasi gender melalui pemanfaatan struktur signifikansi dan legitimasi.

Dominasi gender tersebut selanjutnya menaturalisasikan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam struktur di industri media massa, naturalisasi kekerasan seksual diwujudkan ke dalam berita yang mengandung kekerasan simbolik karena terdapat intimidasi terhadap perempuan melalui penggunaan bahasa media massa.

Intimidasi melalui bahasa, sebagaimana dinyatakan Pierre Bourdieu merupakan kekerasan simbolik. Salah satu wujud kekerasan simbolik adalah berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* di media massa. *Blaming the victim* adalah korban kekerasan seksual dianggap bertanggung jawab atas musibah yang menimpanya.

Sebelumnya, penelitian yang pernah dilakukan Anna Puji Lestari dan Sunarto (2017) menyatakan bahwa perempuan korban pemerkosaan tidak bisa menyatakan pengalamannya traumatisnya karena yang menentukan keadaan tubuhnya diperkosa atau tidak adalah polisi, dokter atau pun psikolog yang tidak berpihak pada korban.

Sedangkan pada berita *blaming the victim*, narasumber yang dihadirkan dalam berita justru yang tidak berpihak pada korban. Korban juga tidak diberikan ruang untuk menyatakan pendapatnya dalam berita tersebut. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa berita *blaming the victim* merupakan berita yang mengandung kekerasan simbolik yang mengalienasi perempuan korban pemerkosaan.

Dalam konteks media, para pekerja media berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (sebagai agen sosial), bersama-sama melakukan tindakan bekerja

untuk memenuhi kepentingan masing-masing dengan memanfaatkan semaksimal mungkin properti sosial mereka (struktur sebagai media interaksi). Mereka bekerja dalam sebuah aturan main (struktur sebagai hasil interaksi) yang telah ditetapkan oleh pihak dominan dalam media (biasanya laki-laki yang bertindak sebagai pimpinan, pendiri, atau pemegang saham dominan). Aturan main tersebut merupakan perwujudan dari ideologi pihak dominan karena kemampuannya dalam memanfaatkan modalitas struktur mereka.

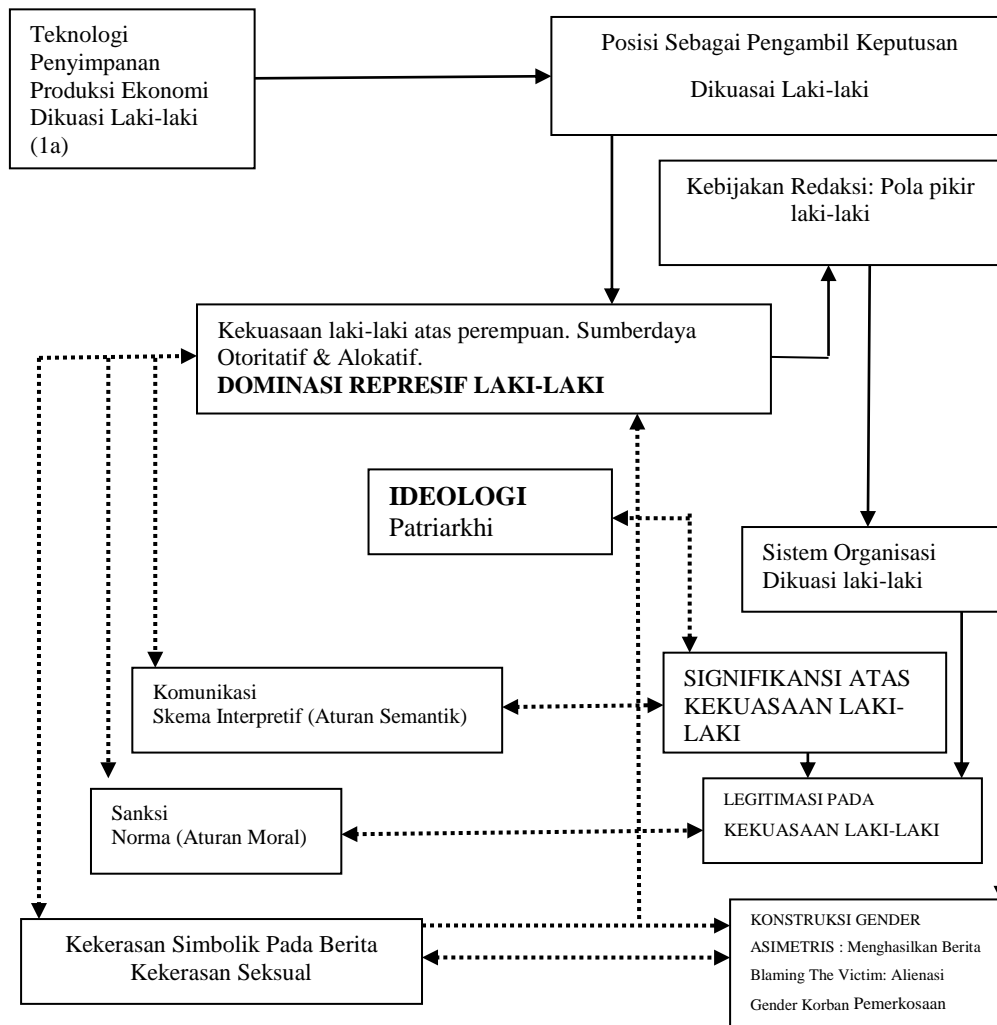
Institusi media didominasi oleh pekerja laki-laki dan pemilik modal, maka ideologi yang dominan dalam media adalah ideologi yang mendukung pemenuhan kebutuhan bagi laki-laki, yakni patriarki. Melalui mobilisasi struktur pemaknaan dan legitimasi kepentingan pekerja laki-laki dan pemilik modal maka ideologi gender tersebut menjadi bersifat dominatif terhadap pekerja perempuan. Pekerja perempuan ini tidak mampu menghancurkan struktur dominasi tersebut disebabkan setiap tindakan yang dilakukannya akan selalu mereproduksi struktur dominasi tersebut.

Dalam sebuah industri media, seorang aktor (wartawan) pastilah mengikuti struktur (pola kerja) tempatnya bekerja. Pola kerja antara satu perusahaan media dengan perusahaan media lain tentulah berbeda. Implikasinya, karakter para pekerjanya berbeda pula, hal tersebut menjadikan tulisan yang dihasilkannya berbeda dari tulisan yang dihasilkan oleh industri media massa lain.

Apabila dikaitkan dalam penelitian ini, gaya penulisan *blaming the victim* yang mengalienasi (meniadakan) pendapat korban kekerasan seksual diproduksi

dan direproduksi di *Suaramerdeka.com*. Hal tersebut terjadi karena struktur dominasi gender, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.3.
Struktur Dominasi Gender Perusahaan Media Massa



Keterangan gambar: Tanda panah menunjukkan pengaruh langsung; Tanda panah putus-putus menunjukkan kesatuan inheren; Tanda panah timbal balik menunjukkan saling pengaruhi.

Untuk lebih lengkapnya, penjelasan gambar tersebut adalah sebagai berikut:
pada seleksi karyawan, keberadaan pekerja laki-laki lebih diutamakan daripada

perempuan, tidak mengherankan apabila terdapat lebih banyak wartawan laki-laki dari pada perempuan.

Banyaknya pekerja laki-laki di media massa menyebabkan posisi pengambil keputusan dikuasai laki-laki. Posisi tersebut adalah jabatan sebagai Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana dan Redaktur (*desk*). Hal tersebut, tentu saja menyebabkan dominasi represif laki-laki atas perempuan karena kekuasaan dan sumber daya dikuasai laki-laki.

Posisi pengambil keputusan yang dikuasai laki-laki menyebabkan kebijakan redaksi dengan pola pikir laki-laki dominan, suara perempuan dikesampingkan. Hal tersebut menyebabkan sistem organisasi media massa dikuasai laki-laki hingga kemudian meneguhkan kekuasaan laki-laki dan legitimasi keputusan di ruang redaksi. Dominasi pekerja laki-laki atas perempuan menyebabkan konstruksi gender asimetris.

Konstruksi gender asimetris merupakan perwujudan kekuasaan dengan dominasi pekerja laki-laki atas perempuan menyebabkan bahasa redaksi (aturan semantik) dan norma dikuasai laki-laki sehingga menghasilkan kekerasan simbolik (*blaming the victim*) pada berita kekerasan seksual.

Aturan semantik (bahasa redaksi) dan norma yang dikuasai laki-laki menyebabkan para aktor perempuan dan laki-laki melakukan produksi dan reproduksi berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* sebagai aturan main yang ditetapkan pihak dominan untuk tujuan tertentu. Berita *blaming the victim* merupakan berita yang mengalienasi perempuan korban pemerkosaan

karena menyingkirkan pendapatnya dari berita, justru menghadirkan narasumber yang tidak berpihak pada korban.

1.5.4. Teori Feminis Radikal Kultural

Pemberitaan kekerasan terhadap perempuan di media massa perlu dilihat dari sudut pandang feminis. Feminisme bukanlah suatu gerakan yang melawan atau memusuhi kaum laki-laki. Sebaliknya, gerakan ini mau menentang ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu masyarakat yang bersifat patriarki (Raho, 2016: 224).

Istilah feminis sebagai teori merupakan kerangka pengetahuan yang menawarkan penjelasan-penjelasan kritis terhadap subordinasi perempuan. Meminjam istilah Simone de Beauvoir, kritis berarti menentang perempuan dijadikan *the second sex*.

Sedangkan Stacey menyoroti patriarki sebagai salah satu isu yang secara sistematis menindas perempuan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang memberi kuasa lebih bagi laki-laki sebagai dominan dan menjadikan perempuan tidak dominan, harus tunduk pada laki-laki (Dalam Sunarto, 2009: 33).

Feminisme memiliki perspektif yang lain dalam mendefinisikan masalah pemerkosaan. Feminisme tidak hanya menjelaskannya dari sisi hukum, tetapi melibatkan persoalan sosial. Feminis menyatakan bahwa pemerkosaan adalah kesalahan berat, terlalu sering diabaikan, disalah artikan, dan dilegitimasi (Anonymous, Jurnal Perempuan No. 71, 2011: 120).

Pandangan yang paling sering diidentifikasi oleh aktivis feminis bahwa pemerkosaan adalah kejahatan kekerasan, bukan sekadar aktivitas seksual.

Sejumlah besar sebab mengapa laki-laki melakukan pemerkosaan dikarenakan struktur masyarakat patriarki memberikan ruang bagi laki-laki untuk melakukan dominasi. Secara psikologis, laki-laki kemudian merasa bebas melakukan sesuatu yang dia mau, termasuk memaksakan kehendaknya dalam hal seksual. Oleh karena itu, tantangan terbesar feminis adalah menentang pandangan tradisional bahwa pemerkosaan merupakan kesalahan korban sendiri (Anonymous, Jurnal Perempuan No. 71, 2011: 121).

Penelitian ini menggunakan Teori Feminisme Radikal Kultural untuk menjelaskan mengenai kompleksitas seksualitas perempuan. Asumsi yang mendasari digunakannya teori ini adalah karena feminis ini *concern* pada masalah seksualitas perempuan.

Sumbangan Feminisme Radikal sangatlah besar pada gerakan perempuan secara umum karena telah melakukan analisis mengenai *personal is political* yang memberi peluang politik bagi kaum perempuan (Fakih, 2013: 86).

Politik dalam konteks ini diartikan sebagai kekuatan terstruktur yang mengatur suatu kelompok/jenis kelamin tertentu, sementara kelompok yang diatur dan tersubordinasi mengalami penindasan.

Mengenai hal tersebut, Gayle Rubin menekankan bahwa represi seks dibangun atas dasar doktrin esensialisme seksual. Esensialisme seksual merupakan kepercayaan bahwa hubungan seksual adalah kekuatan yang alamiah, yang hadir sebelum adanya kehidupan sosial dan harus dikendalikan, karena kalau tidak, hal itu akan mengancam struktur, yang dihadapkan oleh peradaban terhadap manusia (Remick dalam Tong, 2008: 95).

Kebudayaan kita yang fobia terhadap seks, juga terus menerus menawarkan gambaran perempuan sebagai penggoda seksual yang manipulatif, yang menggunakan pesona ragawinya untuk mendapatkan kendali atas hati, dan terutama dompet seorang laki-laki (Tong, 2008: 97).

Penggambaran perempuan sebagai penggoda seksual di media massa lantas menjadikan perempuan sebagai pihak yang kemudian disalahkan atas peristiwa pemerkosaan yang menimpanya. Perempuan sebagai korban yang tersakiti disalahkan dan diabadikan dalam berita kekerasan seksual sehingga mereproduksi sistem patriarkal mengenai konsep *blaming the victim* di benak masyarakat (pembaca).

Media massa memaksa kita menyalahkan korban pemerkosaan dan menjelaskan kronologis erotis seolah-olah korban telah “menjerat” sang predator. Hal tersebut disebut Baudrillard sebagai pornografi informasi dan komunikasi (dalam Ritzer, 2010: 185).

Pornografi informasi oleh Feminis Radikal Kultural diklaim membahayakan perempuan melalui tiga cara: (1) mendorong laki-laki untuk berperilaku berbahaya bagi perempuan secara seksual; (2) menistakan perempuan sebagai manusia yang tidak mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri karena perempuan dinilai secara aktif mencederai, atau secara pasif menerima penganiayaan seksual; dan (3) dengan mengarahkan laki-laki untuk tidak saja berfikir bahwa perempuan adalah manusia yang kurang, tetapi juga dengan memperlakukannya sebagai warga negara kelas dua, yang tidak layak mendapat

proses serta perlakuan yang setara dengan apa yang biasa didapat laki-laki (Tong, 2008: 99).

Sedangkan Andrea Dworkin dan Catharine MacKinnon mendefinisikan pornografi sebagai subordinasi perempuan yang eksplisit secara seksual, dan grafis melalui gambar atau kata-kata yang juga melingkupi perempuan yang didehumanisasi sebagai obyek seksual, benda, atau komoditi yang menikmati rasa sakit, rasa malu, atau pemerkosaan yang ditampilkan dalam skenario yang merendahkan, melukai dan menyiksa. Perempuan dipertunjukkan sebagai kotor dan inferior: berdarah, memar, atau terluka di dalam konteks yang membuat semua itu seksual (dalam Tong, 2008: 99).

1.5.5. *Blaming the Victim*: Penjahat Seksual Dibela, Korban Disalahkan

Konsep *Blaming the victim* yang digunakan dalam penelitian ini mendeskripsikan bahwa korban pemerkosaan disalahkan dan dituduh sebagai penyebab peristiwa traumatis yang menimpanya. Korban disalahkan karena dianggap pasif (pasrah dan menerima serta menikmati perlakuan seksual dari pemerkosa). Sedangkan penjahat dianggap tidak bersalah karena tidak mungkin bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu, dalam pandangan masyarakat patriarki merupakan sesuatu yang dianggap tidak bisa dikontrol oleh manusia.

Konsep *blaming the victim* pertama kali dikemukakan oleh Ryan William (1971: 31-5). Ryan mengkritisi Iklan poster sebuah perusahaan farmasi besar pada saat itu. Iklan tersebut memuat gambar dan tulisan tentang peringatan akan bahaya cat timah yang tertelan oleh anak-anak karena dapat menyebabkan kematian. Iklan

tersebut mendesak para orang tua untuk mencegah anaknya memakan cat (cat untuk mewarnai *coloring book*). Iklan tersebut memberikan label akan kelalaian para ibu dalam menjaga balitanya karena dianggap tidak memberikan pengawasan konstan. Para ibu dinilai bersalah karena tidak bisa mencegah balitanya memakan remahan-remahan tinta.

Ryan menjelaskan, iklan tersebut membebankan rasa bersalah pada para ibu atas kematian atau sakit parah yang menimpa anak-anak mereka akibat memakan cat. Hal tersebut, menurut Ryan, merupakan distorsi realitas yang mengerikan. Menyalahkan para ibu atas kematian anaknya merupakan kedok bagi perusahaan farmasi seolah memiliki jiwa kemanusiaan dan berpihak pada publik. Tentu saja, hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Selanjutnya, oleh Ryan, fenomena tersebut diterjemahkan sebagai *blaming the victim*.

Ryan juga menjelaskan konsep *blaming the victim* dalam penerapannya pada masyarakat miskin di Amerika pada saat itu. Masyarakat miskin disalahkan karena dinilai miskin motivasi untuk bekerja dan kekurangan informasi kesehatan.

Ryan menyatakan bahwa setiap peristiwa kejahatan, sakit mental, penyimpangan masyarakat, pengangguran, selalu dibangun berdasarkan kerangka ideologi *blaming the victim*. Ryan William mendeskripsikan *blaming the victim* sebagai sebuah cara untuk mempertahankan kepentingan kelompok berkuasa.

Konsep *blaming the victim* kemudian diadopsi oleh para advokat untuk korban kriminal, khususnya kasus pemerkosaan. Konsep *blaming the victim* pada korban kejahatan seksual adalah menyatakan bahwa korban pemerkosaan dianggap sebagai pendosa (Schoellkopf, 2012).

Selain itu, *blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971). Lebih lanjut, korban pemerkosaan yang diserang oleh orang yang dikenal cenderung disalahkan daripada perempuan yang diperkosa oleh orang yang tidak dikenal (Amir, 1971; Bieneck & Krahe, 2011).

Terdapat sejumlah alasan mengapa orang-orang menyalahkan korban atas tindak kriminal yang dialaminya. Menurut *The Canadian Resource Centre for Victims of Crime* (2009), alasan tersebut adalah berawal dari miskonsepsi mengenai peran korban dan pelaku aksi kekerasan. Korban seringkali secara salah digambarkan sebagai individu pasif dan menerima kekerasan yang dialaminya. Sedangkan pelaku pemerkosaan dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak kekerasan karena diarahkan oleh kekuatan yang tidak dapat dikontrol olehnya. Misalnya saja, nafsu birahi.

Ryan menyatakan bahwa sebab korban disalahkan karena erat kaitannya dengan mitos (1971: 35). Mitos adalah suatu keyakinan yang beredar luas menyangkut suatu hal yang belum tentu kebenarannya (Widyarini, 2009: 11).

Mitos-mitos tentang pemerkosaan mempunyai sejarah yang panjang dan berasal dari hukum-hukum yang berlaku di masa lalu. Pada masa lalu, pemerkosaan adalah sebuah ritual yang dilakukan laki-laki untuk memperoleh istri, apabila laki-laki memerkosa seorang perempuan, maka ia akan mendapatkan hak untuk mengambil perempuan tersebut (Damayanti, 1999).

Begitu pula mitos yang hidup dan berkembang selama ribuan tahun menyatakan bahwa perempuan pada dasarnya adalah penggoda sebagaimana

Hawa menggoda Adam. Mitos ini terus menerus diyakini masyarakat sehingga laki-laki kemudian tidak disalahkan atas tindak pemerkosaan yang dilakukannya.

Mitos yang menyatakan bahwa perempuan menggoda gairah laki-laki untuk memerkosanya, telah terbantahkan oleh berbagai riset. Faktanya, ditemukan bahwa mayoritas pemerkosaan direncanakan. Artinya, pemerkosaan bukan tindakan impulsif dan spontan, melainkan tindakan yang disadari dan direncanakan (Bagus Takwin, 2011: 12). Dengan demikian, pemerkosaan merupakan tanggung jawab pemerkosa, bukan korban. Pemerkosalah yang seharusnya disalahkan atas tindak kejahatan yang dilakukannya.

Mitos lain tentang pemerkosaan tersebut ada dalam mitologi Yunani. Tersebutlah kisah, Poseidon (Dewa Laut) memerkosa Medusa. Tetapi dewa laut itu dibebaskan penguasa Athena. Tuduhan justru berbalik: Medusalah pengundang birahi Poseidon! Hukuman jatuh pada Medusa. Ia dikutuk menjadi monster. Wajahnya dirubah menjadi bengis. Setiap helai rambutnya tumbuh menjadi ular. Bola matanya berubah menjadi bola api dan sorot matanya menyembur lidah-lidah api. Seluruh kota gemetar ketakutan. Sidang Dewan kota memutuskan untuk memburu dan membunuh Medusa. Selanjutnya, tersebutlah Pricles, yang dinobatkan sebagai pahlawan perang karena telah berhasil menebas leher Medusa ketika sedang tertidur lelap. Medusa tewas (Rocky Gerung, 2011: 4-5).

Feminis kemudian mengingat kematian Medusa dengan cara lain: pada leher yang ditebas, pada genangan darah yang mengalir, terdapat cerita panjang tentang kekuasaan, tipu muslihat dan kepengecutan politik. Pemerkosaan adalah

konspirasi politik patriarki. Dalam tindak pemerkosaan, perempuan diobyeikkan sebagai mangsa yang tak mungkin melawan. Ia mutlak milik sang predator. Pada tindak pemerkosaan, motif dasarnya adalah penguasaan tubuh perempuan sebagai hak alamiah laki-laki. Tubuh perempuan menjadi lokasi alamiah pelaksanaan kekuasaan. Itulah sebabnya Poseidon tak mungkin bersalah. Alam melindunginya. Justru, Medusa, korban pemerkosaan yang salah.

Mitos yang tak berdasar dan terverifikasi asal usulnya tersebut diyakini masyarakat patriarki hingga sekarang. Masyarakat lantas mengharuskan perempuan korban pemerkosaan menanggung kesalahan dan dituduh sebagai sumber penggoda. Lebih spesifik lagi, tidak jarang media massa menyorot baju yang dipakai oleh korban sebagai penyebab tindak pemerkosaan yang dialaminya. Tidak jarang, berbagai artikel media massa meneguhkan bahwa baju perempuan yang terlalu terbuka bisa meyulut nafsu pemerkosa.

Berita kekerasan seksual terhadap perempuan yang menyalahkan korban (*blaming the victim*) merupakan terjadinya simbol seksualitas perempuan yang dikendalikan oleh laki-laki. Kaitannya dengan peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh korban, banyak pihak menganggap mereka sebagai emosional dan irasional. Lebih parah lagi, para korban merasa 'seolah-olah' diperkosa. Pandangan gender dominan kerap mengaitkan tindak pemerkosaan sebagai peristiwa seksual wajar karena *sexual consent* atau suka sama suka. Berbagai hal tersebut lantas membuat korban semakin tersudut dan kemudian disalahkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality* menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki

dan perempuan tidaklah sekadar biologis. Namun, melalui proses sosial dan kultural (dalam Fakih, 2013: 72).

Oleh karena itu, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas. Sedangkan jenis kelamin (seks), selalu tetap. Perbedaan gender pada proses berikutnya melahirkan peran gender. Banyak struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut.

Manifestasi ketidakadilan tersebut menimbulkan kekerasan seksual terhadap perempuan. Perbedaan gender dan sosialisasi gender yang salah telah menganggap perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya lebih kuat. Pandangan keliru tersebut menimbulkan masalah apabila kelemahan perempuan mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memerkosa perempuan.

1.5.6. Alienasi Gender: Penyingkiran Pendapat Korban Sebagai Narasumber Berita

Konsep alienasi yang digunakan dalam penelitian ini dimunculkan untuk mendeskripsikan alienasi (penyingkiran) pendapat korban kekerasan seksual pada berita *blaming the victim*. Penyingkiran yang dimaksud adalah meniadakan kehadiran pendapat korban sebagai narasumber berita.

Berbagai berita pemerkosaan justru menghadirkan pendapat dari para narasumber berita yang tidak berpihak pada korban. Tak jarang, narasumber

menyatakan bahwa tidak terdapat tindakan perkosaaan, melainkan hubungan seksual yang didasari rasa saling suka (*sexual consent*).

Adapaun istilah alienasi merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Hegel. Hegel menyerap konsep alienasi dari teologi Protestan yang biasanya digunakan berkaitan dengan alienasi seseorang dari Tuhan (dalam Feuer, 1962: 117).

Alienasi (*alienation*) berasal dari kata berbahasa Latin *alienatio*. Kata benda ini menderivasi maknanya dari kata kerja *alienare* (untuk menjadikan sesuatu milik orang lain, membawa pergi melepaskan). Salah satu penggunaan pokok dalam bahasa Latin terhadap *alienare* berhubungan dengan kepemilikan. Dalam konteks ini, *alienare* berarti ‘mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain’ (Kaufman, 1965: 143).

Selanjutnya, Karl Marx menggunakan konsep alienasi untuk berbicara mengenai eksistensi hubungan alienasi antara pekerja dan produknya oleh kekuatan-kekuatan ekonomi asing dan bermusuhan. Marx memikirkan antara lain dominasi terhadap produk yang merupakan dominasi terhadap pekerja itu sendiri karena pekerja tidak bisa menikmati produk tersebut. Bagi Marx, seharusnya, karakteristik esensial manusia adalah individualitas, sosialitas dan inderawi, bukannya dominasi (Marx, 1963).

Konsep alienasi yang dikemukakan oleh Marx telah memunculkan penggunaan istilah tersebut oleh sejumlah besar tokoh-tokoh dalam kaitannya dengan ketidakmampuan untuk mengontrol atau bahkan memahami berbagai

peristiwa dan struktur sosial, ekonomi, dan yang paling utama politik yang memengaruhinya (Richard Schacht, 2009: 222).

Konsep alienasi merupakan konsep multidimensi sehingga harus diperhitungkan fakta bahwa istilah tersebut dewasa ini memang digunakan dalam kaitannya dengan berbagai fenomena (Schacht, 2009: 134).

Dalam Buku *Alienasi Pengantar Paling Komprehensif* (terjemahan) (2009, 160-290), Richard Schacht memaparkan penggunaan konsep alienasi oleh sejumlah tokoh, berikut pemaparannya:

Erich Fromm menggunakan istilah alienasi untuk mengkarakterisasikan berbagai relasi yang mungkin dari seseorang dengan dirinya sendiri, orang lain, alam, pekerjaan, dan berbagai hal. Lebih lanjut, Fromm menyatakan bahwa kapanpun seseorang merasa sesuatu berlangsung tidak seperti seharusnya, maka orang tersebut bisa dikatakan mengalami alienasi. Fromm menerapkan konsep alienasi pada hal-hal yang berkaitan dengan cinta, pikiran, harapan, pekerjaan, bahasa, hubungan manusia dengan dunia, budaya atau masyarakat kontemporer, serta proses konsumsi dan produksi.

Selanjutnya, Karen Horney membahas ‘alienasi dari diri’ yang cukup sering digunakan dalam berbagai tulisan sejumlah teoritis psikoanalisis. Buku pertama Horney yang berbicara mengenai ‘alienasi dari diri’ berjudul “*New Ways in Psychoanalysis*.” Dalam buku tersebut, kondisi alienasi dinyatakan menyangkut tertekannya spontanitas atau individualitas yang spontan. Jika individu spontan dari seseorang telah terhalang, teralihkan, atau tersumbat, maka ia dikatakan berada dalam kondisi teralienasi dari diri sendiri atau alienasi dari diri. Horney

memahami 'diri individu spontan' dalam kaitannya dengan pernyataan spontan dari inisiatif, perasaan, harapan, dan opini individu.

Konsep alienasi juga digunakan oleh sejumlah tokoh sebagai berikut, Middleton menganggap alienasi dapat diterapkan ketika menjumpai pernyataan 'saya sering merasa kesepian'. Demikian juga McClosky dan Schaar menggunakan istilah tersebut untuk menyebut 'perasaan kesepian dan rindu terhadap hubungan primer yang suportif. Mereka berpendapat bahwa teralienasi adalah merasakan kekurangan hubungan yang bermakna dengan orang lain dan merasa tidak bahagia dengan kekurangan itu.

Aiken dan Hage menerapkan alienasi sebagai ketidakpuasan dalam hubungan sosial. Aiken dan Hage mengkarakterisasikan alienasi dalam kaitannya dengan ketidakpuasan dalam hubungan-hubungan sosial. Kriteria mereka bagi eksistensi alienasi itu terdapat pada tuntutan jawaban 'ya' atau 'tidak' terhadap pertanyaan apakah seseorang terpuaskan dengan orang-orang tempat ia bergaul. Orang-orang dalam konteks ini merupakan 'pengawas' dan 'sesama pekerja'.

Heidegger membahas alienasi dalam bukunya yang berjudul *Being and Time*. Heidegger membedakan apa yang ia sebut sebagai dua cara mengisi hidup secara fundamental, yang pertama disebutnya sebagai 'autentik' dan yang lainnya sebagai 'inautentik'. Eksistensi autentik adalah eksistensi yang ditentukan oleh diri sendiri (*self-determined*), dibentuk dan diarahkan oleh berbagai keputusan dan pilihan yang benar-benar merupakan milik orang itu sendiri, dan dibuat dalam kesadaran yang penuh atas berbagai kondisi fundamental kehidupan manusia (antara lain keniscayaan menjumpai kematian dan bertanggung jawab atas

eksistensi dan perbuatannya sendiri). Sedangkan eksistensi 'inautentik' adalah eksistensi yang terabsorpsi pada masa sekarang, yang dideterminasi oleh berbagai konvensi dan ekspektasi sosial yang impersonal, dan yang memanggungkan suatu penolakan sistematis dalam menghadapi kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas.

Tillich membicarakan alienasi dalam kaitannya dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan dikaitkan dengan pengakuan terhadap keterbatasan seseorang, tetapi tidak harus disertai oleh hasrat yang berlebihan. Hasrat berlebihan dipahami Tillich sebagai 'hasrat yang tidak terbatas untuk menyeret keseluruhan realitas ke dalam diri.'

Selanjutnya, Sartre menggunakan istilah alienasi dalam hubungannya dengan pengalaman individu terhadap dirinya sendiri sebagai suatu objek (bukan sebagai subjek murni) melalui mediasi individu yang lain. Penggunaan istilah alienasi oleh Sartre tersebut merupakan satu-satunya terminologi yang tidak dipengaruhi oleh Marx.

Sedangkan konsep alienasi yang digunakan dalam penelitian ini dekat dengan konsep yang dikemukakan oleh Sartre. Konsep alienasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan korban pemerkosaan yang teralienasi. Sebagai pengalaman traumatis korban pemerkosaan didefinisikan melalui mediasi individu yang lain (polisi) yang justru tidak berpihak pada mereka. Seringkali polisi hadir sebagai narasumber berita pemerkosaan. Para narasumber tersebut kemudian memberikan pendapat mengenai peristiwa pemerkosaan yang dialami perempuan dari sudut pandangnya (sudut pandang laki-laki). Sudut pandang

tersebut seringkali menyatakan peristiwa asusila yang terjadi merupakan *sexual consent*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian Anna Puji Lestari dan Sunarto yang telah disampaikan pada *International Post-Graduate Conference on Media and Communication* di Surabaya, 13 November 2017 menyatakan bahwa perempuan korban pemerkosaan tidak diberi ruang untuk menjelaskan peristiwa traumatis yang menimpanya. Pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritaslah yang menentukan kondisi tubuh korban, yakni polisi. Korban pemerkosaan seringkali tidak dihadirkan sebagai narasumber atau dimintai pendapat oleh wartawan ketika menuliskan berita pemerkosaan yang menimpanya. Justru, media massa menghadirkan narasumber berita yang tidak berpihak pada korban (Anna Puji Lestari dan Sunarto, 2017).

Dengan demikian, perempuan korban pemerkosaan bisa dikatakan mengalami alienasi karena yang menilai dan menentukan kondisi tubuhnya adalah pihak lain (polisi). Para korban tidak diberi ruang mengemukakan pengalaman traumatisnya. Ketidakberdayaan korban membuktikan secara penuh bahwa mereka diperkosa dan kekuasaan untuk membuktikan adanya pemerkosaan dilakukan oleh pihak lain menyebabkan para korban teralienasi. Hukum dan pandangan masyarakat semuanya berjenis kelamin laki-laki yang tentu saja memihak laki-laki. Hal tersebut terkait erat dengan kesalahan pandangan mengenai *sexual consent*.

Seharusnya, memahami *sexual consent* adalah untuk menjaga seseorang agar tidak mengalami pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya. Namun,

ironisnya, prinsip *sexual consent* sering kali malah dipelintir maknanya untuk membela pelaku pemerkosaan dengan mengatakan bahwa peristiwa seksual terjadi karena suka sama suka, bukan pemaksaan seksual.

Berkaitan dengan *sexual consent*, Carol Hensell yang bekerja di Departemen Pelayanan Kesehatan Biro Perempuan dan Kesehatan Anak Arizona, menyatakan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (*consent*) termasuk dalam hubungan pernikahan (Carol Hensell, 2011: 115).

Lebih lanjut, Hensell menjelaskan, *consent* adalah kedua belah pihak harus bersepakat jika mereka ingin berhubungan seks. Kedua belah pihak harus sepenuhnya sadar dan waspada. Kedua pasangan sama-sama bebas untuk bertindak dan mengomunikasikan dengan jelas keinginan mereka dan meminta izin. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka terjadi kekerasan seksual.

Terdapat alasan mengapa konsep alienasi yang dimunculkan untuk menjelaskan fenomena *blaming the victim*, bukannya konsep tentang represi. Istilah represi, sebagaimana dinyatakan Michael Foucault, tidak cukup mengungkapkan makna sebenarnya dari aspek produktif kekuasaan (2002: 147).

Konsep alienasi yang dimunculkan dalam penelitian ini erat kaitannya dengan masalah gender karena menyangkut pembebasan seksualitas perempuan dari ketertindasan struktur dan aturan yang diciptakan laki-laki dan hanya mewakili suara dan kepentingan laki-laki.

Ideologi gender yang digunakan untuk melawan ketertindasan merupakan ideologi feminis yang menentang segala bentuk penindasan terhadap perempuan.

Ideologi feminis merupakan ideologi baik yang bisa digunakan untuk melawan ideologi gender dominan karena ia menginginkan kesetaraan mengenai segala hal antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian ideologi menurut Althusser merupakan suatu reaksi terhadap dominasi, setiap penindasan akan menghasilkan suatu usaha pada pihak tertindas untuk melepaskan diri. Salah satu alat penting dalam upaya pembebasan ini adalah ideologi (2008: xxv). Artinya, sebagai sebuah ideologi, feminis mutlak diperlukan dalam penelitian ini sebagai jawaban akan adanya dominasi maskulin yang menindas seksualitas perempuan.

Oleh karena itu, dimunculkan konsep alienasi gender. Alienasi gender mencoba menjawab pandangan ideologi dominan yang meniadakan pendapat korban pemerkosaan sebagai narasumber berita. Ideologi dominan dalam berita pemerkosaan selalu menghadirkan narasumber yang tidak berpihak pada korban. Seringkali para narasumber yang dihadirkan justru menyatakan bahwa korban pemerkosaan bertanggung jawab terhadap serangan seksual yang menimpanya (*blaming the victim*).

Blaming the victim sendiri bisa terjadi karena adanya kekuatan simbolik (*symbolic power*). Bourdieu menjelaskan bahwa *power* ada dimana-mana. Namun, ironisnya, kita semua tidak bisa mengenalinya. Bourdieu menjelaskan, kita semua dituntut untuk mengenali *power* yang tidak terlihat yang ia sebut *symbolic power*. *Symbolic power* merupakan *power* yang tidak terlihat, bahkan oleh subjek *power* tersebut (1991: 163-4). Selanjutnya, *symbolic power* erat kaitannya dengan *symbolic violence*.

1.5.7. Kekerasan Simbolik: Dominasi Bahasa Berita

Bourdieu berpandangan bahwa bahasa merupakan hubungan komunikasi yang kompleks dan merupakan hubungan kuasa simbolik antara si pembicara.

Dari Max Weber, Bourdieu memperoleh kesadaran tentang pentingnya dominasi dan sistem simbolik dalam kehidupan sosial, serta gagasan tatanan sosial yang bertransformasi menjadi teori arena (*fields*). Bourdieu kemudian mengembangkannya menjadi tindakan bermakna, yaitu tindakan terkait reaksi atau perilaku orang lain. Oleh karena itu, menurut Bourdieu, penjelasan sosial harus selalu memperhitungkan dimensi simbolis yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan (tradisional, karismatik, legal-rasional) (Haryatmoko, 2011; 3).

Menurut Bourdieu, bahasa tidak pernah bebas nilai. Ketika seseorang mengatakan sesuatu hal, orang yang menerima akan menangkap maksud yang berbeda. Setiap kata dan setiap ekspresi memiliki ancaman '*antagonis*' yang dicerminkan oleh cara yang hanya dipahami si pengirim dan penerima pesan. Dalam setiap percakapan ada pihak yang mendominasi dan didominasi (Bourdieu, 1991: 39).

Dalam kaitannya dengan patriarki, merupakan sistem yang mendominasi (menunjukkan kuasa simbolik) atau melegitimasi kekuasaannya kepada perempuan. Dalam proses tersebut, legitimasi bahasa resmi melalui sistem pendidikan memiliki peran penting. Sebab, bahasa dipopulerkan lewat sekolah. Dominasi bahasa di sekolah akan dibawa ke rumah dan menjadi pembiasaan (*habitus*). Orang cenderung tidak menyadari intimidasi atau kekerasan simbolik (*symbolic violence*) lewat dominasi bahasa (Bourdieu, 1991: 40).

Kaitannya dengan para pekerja di industri media, mereka telah mengalami pembiasaan (*habitus*) pada penggunaan bahasa bias gender dari sistem sosial patriarki yang disosialisasikan terus menerus melalui struktur budaya organisasi media massa tempatnya bekerja. Bahasa bias gender ini sangat mendominasi, terutama dominasi bahasa yang digunakan media massa untuk menyalahkan korban pemerkosaan pada berita yang ditayangkannya.

Perempuan korban kekerasan seksual di media massa mengalami kekerasan simbolik karena disalahkan atas tragedi pemerkosaan yang menimpanya. Lewat bahasa yang mengintimidasi dan tidak sensitif gender, perempuan dituding sebagai pihak yang memprovokasi terjadinya pemerkosaan yang menimpaya melalui kekuasaan simbolik bahasa.

Bahasa menjadi bagian dari sistem simbolik selain seni, agama, dan mitos. Bahasa menjadi instrumen mempertahankan dominasi atau instrumen untuk mendapatkan kekuasaan (*power*). Bahasa adalah kekuasaan simbolik. Pertukaran bahasa selalu berhubungan dengan kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991: 37).

Banyak orang tidak sadar akan adanya intimidasi, kekerasan simbolik lewat dominasi bahasa. Ucapan tidak hanya disampaikan untuk dipahami tetapi juga sebagai tanda otoritas yang harus diyakini dan dipatuhi (Bourdieu, 1991: 66). Selanjutnya, mereka yang menguasai kapital yang lebih besar (laki-laki) akan menjadi kelas yang dominan.

Bourdieu melihat sistem simbolik (melalui bahasa) sebagai instrumen dominasi. Tradisi fungsionalisme ini menjelaskan produksi simbol dengan

mengaitkannya dengan kepentingan kelas dominan. Kepentingan kelas dominan mewakili ideologi kelompok tertentu yang di-*share* ke masyarakat luas.

Kultur dominan membentuk integrasi di antara kelompok atau kelas dominan. Budaya dominan juga berperan dalam membentuk integrasi masyarakat yang semu, kesadaran palsu, legitimasi kepada aturan yang sudah mapan, menciptakan perbedaan hierarkhis dan melegitimasi perbedaan ini.

Kekerasan simbolik pada dasarnya adalah pemaknaan kategori-kategori pemikiran dan persepsi terhadap agen-agen sosial terdominasi, yang kemudian menganggap tatanan sosial itu sebagai sesuatu yang “adil.” Ini adalah penggabungan struktur tak sadar, yang cenderung mengulang struktur-struktur tindakan dari pihak yang dominan. Pihak yang terdominasi kemudian memandang posisi pihak yang dominan ini sebagai yang “benar.” Kekerasan simbolik dalam arti tertentu jauh lebih kuat daripada kekerasan fisik karena kekerasan simbolik itu melekat dalam setiap bentuk tindakan dan struktur kognisi individual, dan memaksakan legitimasi pada tatanan sosial.

Kuasa simbolik Bourdieu hadir dalam arena dari relasi dialektiknya dengan habitus dan modal (kapital), terutama kapital simbolik. Seseorang yang menguasai kapital dengan habitus yang memadai akan menguasai arena dan memenangkan pertarungan sosial karena di dalam arena selalu terjadi pertarungan sosial.

Mekanisme dominasi simbolik nantinya memuncak pada pemikiran Bourdieu tentang *doxa*. *Doxa* merupakan pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa. Pandangan penguasa itu biasanya bersifat

sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh rakyat banyak, walaupun secara konseptual pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan. Misalnya pandangan penguasa (ideologi dominan) mengenai *blaming the victim*.

1.5.8. Kebijakan Media Sensitif Gender

Kebijakan media massa kaitannya dengan masalah seksual dinilai oleh Frasser Bond cenderung hanya sebagai rangsangan untuk menarik perhatian pembaca. Hal tersebut mendorong agen-agen industri media meliput peristiwa atau cerita-cerita kejahatan maupun roman-roman tak sehat (dalam Suhandang, 2016: 155).

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan (Kbbi.web.id).

Dalam kaitannya dengan kebijakan, media diharuskan bersifat terbuka dan memuat informasi yang benar sesuai dengan fakta. Media harusnya melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan sensitif gender dalam memberitakan berita pemerkosaan yang dialami perempuan untuk pencerahan publik. Menurut Abrar, sebagai kebijakan komunikasi, kebijakan media massa merupakan kebijakan publik (Abrar, 2008: 13).

Tujuan kebijakan media massa, bisa dilihat dari dua segi, sosiologi dan komunikasi. Dari sisi sosiologi, tujuan kebijakan komunikasi adalah menempatkan proses komunikasi sebagai salah satu bagian dari dinamika sosial

yang tidak merugikan masyarakat. Sementara dari sisi komunikasi, kebijakan komunikasi bertujuan untuk melancarkan sistem komunikasi (Abrar, 2008: 16).

Dengan demikian, seharusnya media massa tidak merugikan para korban pemerkosaan dengan menimpakan kesalahan pada mereka. Tegasnya, dari sudut sosiologi, kebijakan komunikasi yang sensitif gender bisa memberdayakan masyarakat dalam melakukan proses komunikasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam komunikasi perlu dilakukan agar masyarakat menjadi sadar gender. Banyak para praktisi media belum memiliki sensitivitas gender sehingga menghasilkan berita *blaming the victim*. Berita tersebut sebenarnya telah melanggar aturan atau kesetaraan gender yang telah diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Konteks kebijakan media massa adalah keterkaitan kebijakan tersebut dengan sesuatu yang melingkupi dirinya, misalnya ekonomi politik, politik komunikasi dan sebagainya.

Konteks ini begitu penting sehingga bisa menentukan domain kebijakan media massa. Sebagai pedoman, kebijakan media massa merupakan kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi (Abrar, 2008: 3).

Media massa merupakan media penyampai informasi perubahan kepada masyarakat sehingga bisa dikatakan sebagai alat konstruksi sosial yang paling ampuh. Pada sebuah industri media massa, biasanya CEO memiliki andil dalam membentuk kebijakan medianya. Selain itu, ruang redaksi media tersebut juga memiliki kebijakan tersendiri dalam bentuk atau format dari pemberitaan.

Selanjutnya, segmentasi pemberitaan biasanya ditentukan oleh redaksi media tersebut.

Kaitannya dengan pemuatan berita *blaming the victim*, pastilah diseleksi terlebih dahulu di meja redaksi. Banyak kebijakan media yang tidak sensitif gender sehingga berita yang dimuat/ditayangkan mengandung unsur *blaming the victim*. Dengan tidak adanya kebijakan sensitif gender di media massa, tidak mengherankan apabila berita pemerkosaan dikemas dengan sudut pandang *blaming the victim* disertai gaya penulisan yang didramatisasi.

Idealnya, kebijakan seharusnya memperlihatkan bentuk perhatian pada kesetaraan gender pada masyarakat. Kebijakan dalam media massa diharapkan mengatur atau membentuk media agar memberikan informasi yang benar tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau berpihak bahkan menyakiti masyarakat, utamanya perempuan korban kekerasan seksual.

Terkait dengan hal tersebut, peran media massa seharusnya bisa menyentuh persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat secara aktual sebagaimana disebutkan oleh Subiakto (dalam Bungin, 2006: 86-7), yakni: (1) harus lebih spesifik dan proporsional dalam melihat sebuah persoalan sehingga menjadi media informasi dan edukasi yang diharapkan masyarakat (tidak mencederai kepentingan publik); (2) dalam memotret realitas, media massa harus fokus pada realitas sehingga tidak menjadi propaganda kekuasaan, potret figur kekuasaan; (3) media harus dapat mencerahkan dan mengutamakan fungsinya sebagai lembaga edukasi, bukan lembaga produksi. Sehingga, tidak terjadi pengarusutan berita (bias) dan kelebihan porsi iklan. Sehingga, masyarakat tidak dirugikan; (4) media massa

harus menjadi *early warning system*. Media massa menjadi sebuah sistem dalam sistem besar peringatan terhadap ancaman lingkungan.

Apabila media bisa menjalankan keempat peran tersebut, maka bias pada pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan bisa diminimalisir hingga kemudian dihilangkan sama sekali. Berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* bisa dihilangkan sama sekali, terutama jika media massa berani berperan sebagai *early warning system*. Artinya, media harus mau menyuarakan peringatan bahaya besar yang diakibatkan bias media dan diskriminasi gender pada pemberitaan. Bahaya diskriminasi gender yang memihak kelompok dominan akan semakin mengukuhkan peran patriarki di masyarakat dan semakin merugikan perempuan sebagai pihak yang ditindas.

1.6. Asumsi Penelitian

Terjadinya berita *blaming the victim* diasumsikan karena kebijakan redaksi di *Suaramerdeka.com* belum sensitif gender dan masih beroperasinya ideologi dominan (patriarki) apabila merujuk berdasarkan Feminisme Radikal Kultural.

1.7.Operasionalisasi Konsep-konsep

Konsep *blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971). Para Korban pemerkosaan yang diserang oleh orang yang dikenal cenderung disalahkan daripada perempuan yang diperkosa oleh orang yang tidak dikenal (Amir,1971; Bieneck & Krahé, 2011).

Terdapat sejumlah alasan mengapa orang-orang menyalahkan korban atas tindak kriminal yang dialaminya. Menurut *The Canadian Resource Centre for Victims of Crime* (2009), alasan tersebut adalah berawal dari miskonsepsi mengenai korban dan pelaku aksi kekerasan. Korban seringkali secara salah digambarkan sebagai individu pasif dan menanggung kekerasan yang dialaminya. Sedangkan pelaku pemerkosaan dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak kekerasan karena diarahkan oleh kekuatan yang tidak dapat dikontrol olehnya. Kekuatan yang tidak dapat dikontrol misalnya saja adalah nafsu birahi.

Dengan demikian, berita dikatakan *blaming the victim* manakala korban pemerkosaan dianggap bersalah dan harus bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya. Berbagai berita di media massa selalu menampilkan pemerkosaan seolah sebagai sesuatu yang beralasan dilakukan atas dasar kebutuhan alami seksual laki-laki.

Konsep *blaming the victim* adalah konstruksi negatif sosok perempuan di media massa. Hal tersebut merupakan kekerasan simbolik yang ditujukan pada korban kekerasan (perempuan) yang terlihat dari pemberitaan di media. Selanjutnya, bisa dijelaskan bahwa berita *blaming the victim* merupakan berita yang mengalienasi korban pemerkosaan karena tidak mengadirkannya sebagai narasumber dalam berita. Berita justru menghadirkan pendapat polisi atau orang-orang yang justru tidak berpihak pada korban.

Sedangkan definisi kekerasan simbolik, menurut Bourdieu, terjadi manakala terdapat pemaksaan sistem simbolisme dan makna (misalnya kebudayaan) terhadap kelompok atau kelas sedemikian rupa sehingga hal itu dialami sebagai

sesutu sah (dalam Jenkins, 2016: 157). Implikasinya, meneguhkan legitimasi relasi kekuasaan yang menyebabkan pemaksaan tersebut berhasil. Para korban pemerkosaan lantas diharuskan menanggung kesalahan atas pemerkosaan yang menyimpannya.

Penelitian ini meneliti mengenai kebijakan media online lokal kaitannya dengan strukturasi gender dominatif sehingga menghasilkan berita *blaming the victim*.

Blaming the victim berkaitan erat dengan konstruksi gender asimetris. Berkenaan dengan hal tersebut, feminis Judith Butler menjelaskan terdapat hubungan antara subyek, kekuasaan, dan seks. Butler berargumen bahwa seks berhubungan dengan konstruksi gender (dalam Gadis Arivia, 2011: 63). Artinya, seks adalah tentang bagaimana masyarakat mendefinisikan perempuan atau laki-laki.

Selama ini, masyarakat selalu mendefinisikan laki-laki sebagai “bernafsu” dan tidak bisa mengendalikan nafsunya. Sedangkan perempuan didefinisikan sebagai pasif dan aseksual. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa laki-laki sebagai makhluk yang secara alamiah tidak bisa mengendalikan nafsunya dan karenanya perempuan harus menutup bagian tubuhnya secara rapat dengan tidak mengenakan rok mini yang bisa mengundang birahi laki-laki (Gadis Arivia, 2011: 63). Implikasinya, ketika perempuan secara kebetulan mengenakan rok mini kemudian ia diperkosa, lantas serta merta seluruh dunia menyalahkannya.

Adapun arti kata pasif yang terus dilekatkan kepada korban pemerkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat menerima saja;

tidak giat; tidak aktif. Selanjutnya, definisi konsep-konsep tersebut diturunkan ke dalam definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Operasionalisasi Konsep-konsep

Konsep	Operasionalisasi
Kekerasan Simbolik	Kasat mata (terlihat bentuknya): kekerasan seksual. Tidak kasat mata (tak terlihat bentuknya): <i>blaming the victim</i> , alienasi gender.
<i>Blaming the victim</i>	Korban dinilai sebagai pasif (pasrah dan menerima kekerasan seksual) dan sumber penggoda (mengundang birahi laki-laki). Korban dinilai ikut menikmati hubungan seks dengan pemerkosa. Pelaku dinilai sebagai secara alamiah tidak dapat mengendalikan nafsunya.
Alienasi Gender	Penyingkiran pendapat korban pemerkosaan atau yang mewakili sebagai narasumber berita pemerkosaan. Alienasi gender merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya <i>blaming the victim</i> .
Kebijakan Internal Media	Berdasarkan panduan kebijakan internal di <i>Suaramerdeka.com</i>
Ideologi dominan	Ideologi patriarki dalam relasi gender asimetris yang menganggap bahwa perempuan sebagai obyek seks, sebagaimana pernyataan feminisme Radikal Kultural.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif perspektif kritis dengan desain Analisis Wacana Kritis. Analisis Wacana Kritis (*critical discourse analysis/CDA*) berarti peneliti menganalisis wacana pada level teks beserta

sejarah dan konteks terjadinya suatu wacana. Oleh karena itu, telaah atas wacana tidak hanya dilakukan pada level teks, tetapi juga dilanjutkan pada faktor-faktor yang memengaruhi suatu teks dihasilkan.

Penelitian ini fokus pada kebijakan *Suaramerdeka.com* menghasilkan berita *blaming the victim* sehingga pada level teks (mikro) akan dianalisis 5 berita kekerasan seksual yang memiliki *derajat blaming the victim* yang dinilai paling tinggi menurut peneliti selama periode Januari 2016 - Desember 2017.

Selanjutnya, untuk mengetahui kebijakan internal redaksi di *Suaramerdeka.com* yang menghasilkan berita *blaming the victim* dilakukan analisis level meso (observasi dan wawancara dengan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana selaku pembuat kebijakan). Selain itu, di level meso juga dilakukan analisis praktik konsumsi teks oleh pembaca.

Selanjutnya, di level makro, dilakukan analisis kebijakan eksternal terkait kultur dominan yang berlaku sehingga terbit berita *blaming the victim*. Bahasan ini akan memfokuskan pada aspek di luar media yang mempunyai pengaruh terhadap keberadaan isi media massa.

Bahasan mengenai analisis sosio-kultural dalam penelitian ini akan lebih menekankan pada aspek ideologi dominan yang menindas kaum perempuan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial dan kultural yang mendominasi sehingga memengaruhi kebijakan redaksional penayangan berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*.

Dengan demikian, analisis sosio-kultural diharapkan mampu membongkar relasi kekuasaan yang mendasari kemunculan dan keberlangsungan macam-

macam wacana tertentu, pengaruh ideologi yang mungkin terjadi pada macam-macam wacana tersebut, cara-cara ketika ideologi melakukan konstruksi atas identitas sosial tertentu, nilai-nilai kultural yang diproyeksikan dan sebagainya. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemaknaan secara komprehensif, peneliti mencoba menemukan relasi-relasi kekuasaan dalam wacana media.

Fokus analisis wacana kritis yaitu praktik kewacanaan yang mengonstruksi representasi dunia dan subjek sosial, dan hubungan kekuasaan dan peran yang dimainkan praktik-praktik kewacanaan dominatif. Tujuan analisis wacana kritis yaitu menjelaskan hubungan antara penggunaan bahasa dengan praktik sosial.

Analisis wacana CDA yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Norman Fairclough yang melihat teks (naskah) memiliki konteks. Menurut Fairclough, setiap penggunaan bahasa merupakan peristiwa komunikatif yang terdiri atas tiga dimensi berikut ini: (1) teks (tuturan, pencitraan, visual, atau gabungan ketiganya); (2) praktik kewacanaan yang melibatkan produksi dan pengonsumsi teks; dan (3) praktik sosial (Fairclough, 2010: 132).

CDA Norman Fairclough melihat teks sebagai hal yang memiliki konteks baik berdasarkan “*process of production*” atau “*text production*”; maupun berdasarkan praktik sosio-kultural. Dengan demikian, untuk memahami wacana (naskah/ teks) kita tidak dapat melepaskan dari konteksnya. Untuk menemukan “realitas” di balik teks diperlukan penelusuran atas konteks produksi teks, dan aspek sosial dan kultural yang memengaruhi pembuatan teks.

Proses pengumpulan data yang multilevel dalam CDA Fairclough dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Pada Level Mikro dilakukan

analisis teks dengan Framing Entman. Robert M. Entman menjelaskan (1993: 51-2), secara umum, teori *framing* menunjukkan bagaimana bingkai yang termanifestasi dalam teks sehingga memengaruhi pemikiran pembaca. Konsep utama *framing* adalah cara untuk mendeskripsikan kuasa suatu teks (media) sebagai komunikasi. Tujuan dilakukan analisis *framing* adalah untuk mengidentifikasi dan memperjelas tendensi di antara banyak teks yang ada. Melalui *framing*, tendensi media dipahami secara lebih tepat dan berlaku universal.

Tahap *Kedua*, analisis Praktik Wacana Meso. Pada level ini dilakukan analisis pada praktik produksi dan konsumsi teks *blaming the victim*. Analisis praktik produksi teks dilakukan melalui pengamatan dengan terlibat langsung pada produksi teks dan melakukan *indepth interview* dengan pengambil kebijakan redaksi (pimpinan) di *Suaramerdeka.com* (Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana). Sedangkan analisis praktik konsumsi teks dilakukan dengan wawancara pada pembaca berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*. Analisis praktik konsumsi dilakukan dengan metode analisis resepsi.

Tahap *Ketiga*, Analisis Makro (praktik sosio-kultural). Dilakukan analisis pada ideologi dominan yang membenarkan pelanggaran pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik. Pada tahap ini dilakukan pula analisis *secondary data* yang relevan dengan tema penelitian serta penelusuran literatur yang relevan dengan tema penelitian. Praktik sosiokultural adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks memasukkan banyak hal seperti konteks situasi, lebih jauh lagi konteks yang berhubungan dengan konteks institusi dan budaya.

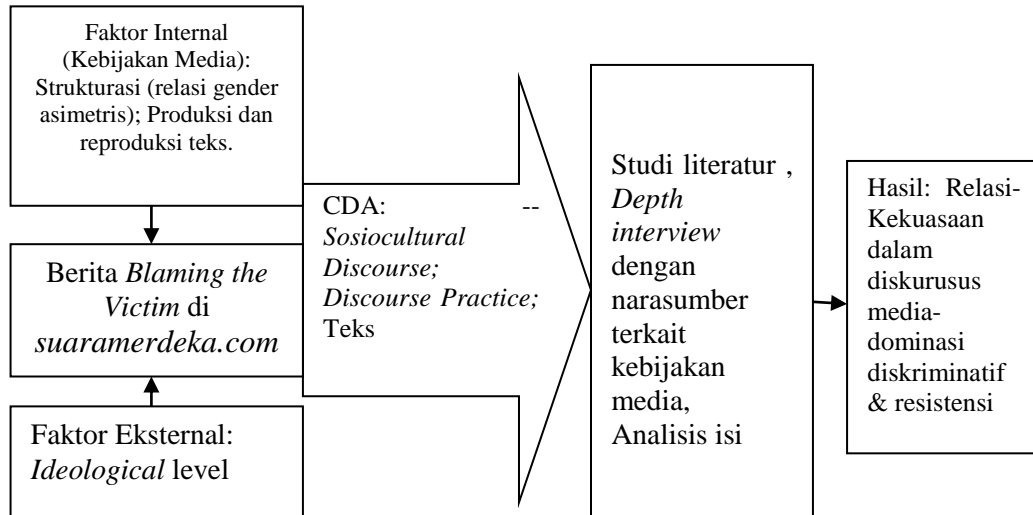
Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada analisis sosio-kultural kaitannya dengan ideologi patriarki yang turut memengaruhi penayangan berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*.

Pada level sosio-kultural teks dilihat dalam sebuah konteks yang melingkupinya dari kondisi sosial dan politik yang berlatar belakang historis. Penggalan data dipusatkan pada tahun 2016-2017, ketika Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa pemerkosaan merupakan kejahatan luar biasa dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Pernyataan presiden tersebut tentu saja memengaruhi perubahan struktur media kaitannya dengan gaya komunikasi gender. Apabila sebelumnya gaya komunikasi media masih diwarnai dominasi maskulin, diharapkan setelah pernyataan Presiden tersebut, dapat menuju ke era *gender equality*.

Dengan demikian, pada level makro, harus dilihat bahwa media merepresentasikan kekuatan-kekuatan yang memengaruhinya. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi kekuatan ideologi dominan yang memengaruhi kebijakan internal berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*.

Hal tersebut dilakukan karena Analisis Wacana Kritis tidak hanya menggambarkan struktur diskursif tetapi juga menunjukkan bagaimana wacana dibentuk oleh hubungan kekuasaan, ideologi, dan efek yang terjadi dari wacana menjadi identitas sosial, hubungan sosial dan sistem kepercayaan dan sistem pengetahuan (Mills, 1997: 149-150). Adapun kerangka kerja penelitian yang akan dilakukan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4.
Kerangka Kerja Penelitian



1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari:

1.8.2.1. Data Primer

Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan bahan berupa teks-teks berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com* untuk kemudian dianalisis dengan metode Framing Entman. Analisis framing Entman dimaksudkan untuk menunjukkan adanya praktik penulisan berita *blaming the victim*.

Entman menyatakan, (1993: 52), meringkai atau *framing* berarti memilih (seleksi) beberapa aspek realitas dan membuatnya lebih menonjol (*salient*) dalam mengomunikasikan teks. Hal-hal tersebut kemudian mengarahkan kepada, *defined problems* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), *suggest remedies* (menekankan penyelesaian) yang pengungkapan *treatment* yang diberikan media terhadap korban.

1.8.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan referensi penunjang berupa tulisan/gambar. Data ini merupakan studi literatur tentang kajian analisis wacana kritis dikaitkan dengan konteks komunikasi massa, yang mana datanya dapat diperoleh dari buku, jurnal penelitian, artikel, serta penelitian terdahulu. Data sekunder bermanfaat untuk pengkajian, penelaahan, analisis masalah penelitian dan juga untuk pengembangan kerangka berpikir. Secara keseluruhan jenis dan sumber data yang akan digunakan digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jenis dan Sumber Data Penelitian

Level	Jenis	Sumber Data
Mikro	Primer	Analisis framing berita <i>blaming the victim</i> dengan model Entman.
	Sekunder	Analisis isi kuantitatif berita-berita <i>blaming the victim</i> di <i>Suaramerdeka.com</i> . Hasil penelitian lain yang relevan, jurnal.
Meso	Primer	Wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan di <i>suaramerdeka.com</i> (Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana).
	Sekunder	Hasil pengamatan dan dokumentasi tertulis pada interaksi pekerja dalam situasi keseharian di <i>Suaramerdeca.com</i> (selama satu minggu). Dokumentasi tertulis dan visual terkait sistem organisasi perusahaan <i>suaramerdeka.com</i> (profil perusahaan, peraturan perusahaan, budaya organisasi, dan lain-lain yang relevan).
Makro	Primer	Analisis dominasi budaya patriarki sehingga membenarkan pelanggaran pada perundang-undangan dan peraturan

	Sekunder	pemerintah yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi kepustakaan dan data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.
--	----------	---

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah berita-berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com* dengan unsur *blaming the victim* dari dua tahun terakhir, yakni periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2017. Alasan yang mendasari penelitian dilakukan di periode tersebut yakni keputusan Presiden Jokowi sebagai kepala negara telah menetapkan kejahatan seksual sebagai kejahatan yang luar biasa sejak Agustus 2016 karena banyaknya angka kejahatan seksual di periode tersebut. Berikut adalah tabel subjek penelitian:

Tabel 1.3.
Subjek Penelitian

Level	Jenis	Subjek Penelitian
Mikro	Primer	Teks berita di suaramerdeka.com dengan isu kekerasan seksual terkait <i>blaming the victim</i> periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2017.
	Sekunder	Dokumentasi dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.
Meso	Primer	Wawancara mendalam pada Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana di <i>Suaramerdeka.com</i> .
	Sekunder	Dokumentasi dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.
Makro	Primer	Analisis ideologi dominan yang membenarkan pelanggaran perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang relevan dengan fokus penelitian.
	Sekunder	Dokumentasi dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendokumentasian isi komunikasi yang diteliti, dengan cara menetik ulang, mengumpulkan dan meng-*copy* berita-berita kekerasan yang akan diriset.

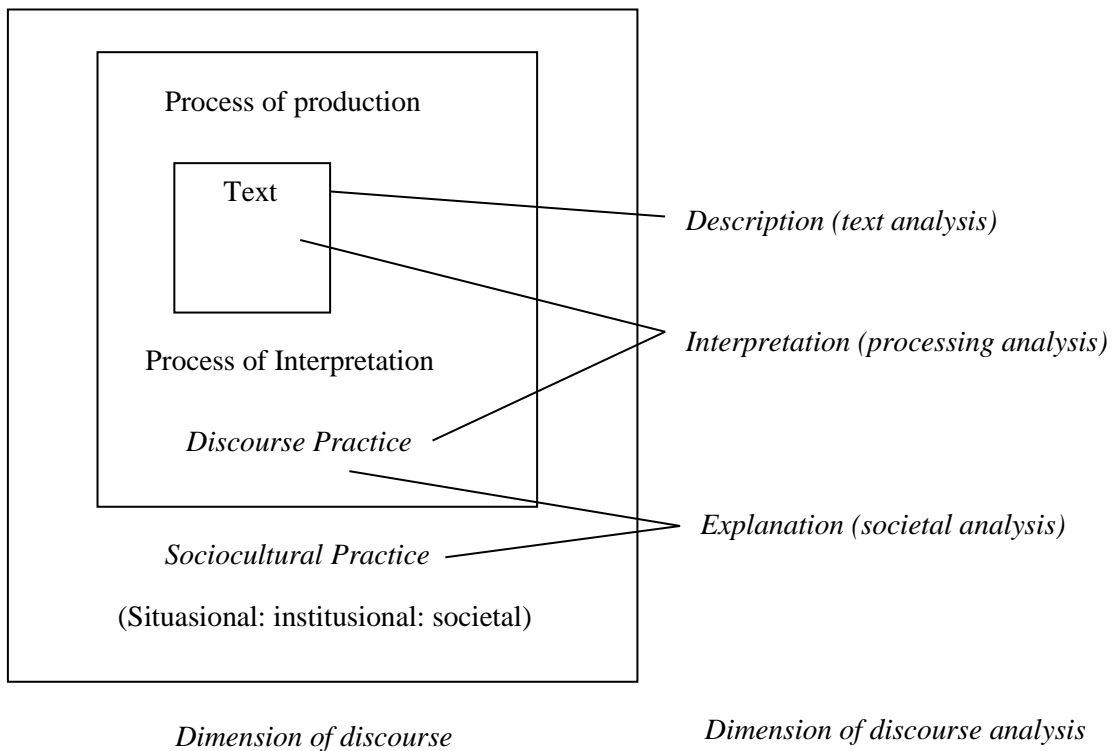
1.8.5. Unit Analisis

Unit analisis dari studi ini adalah berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough (*Analisis Texts, Discourse Practice* dan *Analisis Sociocultural Practice*) (Fairclough, 2010: 132-3). Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu.

Gambar 1.5.
Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (2010: 133)



Fairclough juga membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik serta pemikiran sosial dan politik, atau secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan oleh tokoh ini sering disebut sebagai model perubahan sosial (*social change*). Fairclough membagi analisis wacananya dalam tiga dimensi, meliputi:

Pertama, analisis *Texts*; Menurut Fairclough, analisis *texts* ini disebut pula dengan '*linguistic analysis*'. Teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau antarkalimat digabung sehingga membentuk pengertian/wacana.

Kedua, analisis *Discourse Practice*; merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks/berita. Sebuah berita pada dasarnya dihasilkan lewat proses produksi teks media, seperti bagaimana pola kerja, bagan kerja dan rutinitas dalam menghasilkan berita. Berita diproduksi dalam cara-cara yang spesifik, dengan rutinitas dan pola kerja yang telah terstruktur berdasarkan laporan wartawan di lapangan, atau dari sumber berita yang akan ditulis oleh editor dan sebagainya. Sedangkan distribusi teks/berita, tergantung pada pola dan jenis teks, serta bagaimana sifat institusi yang melekat dalam berita tersebut.

Selanjutnya, pada *discourse practice*, diperlukan adanya wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana mengenai kebijakan penayangan berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*, serta melakukan penelitian *newsroom*. Penelitian *newsroom* dilakukan dengan mengamati proses produksi berita.

Setelah dilakukan wawancara mendalam, berikutnya akan dilakukan reduksi data dengan teknik analisis data Spardley. Spardley (1999) merangkum “Alur Penelitian Maju Bertahap” yang terdiri atas lima prinsip, yaitu: (1) Peneliti dianjurkan hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data; (2) Mengenali langkah-langkah pokok dalam teknik tersebut, misalnya 12 langkah pokok dalam wawancara etnografi dari Spardley; (3) Setiap langkah pokok dijalankkn secara berurutan; (4) Praktik dan latihan harus selalu dilakukan; (5) Memberikan *problem solving* sebagai tanggung jawab sosialnya, bukan lagi *ilmu untuk ilmu*.

Inti dari teknik analisis data Spardley ini adalah upaya memperhatikan makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami melalui kebudayaan mereka. Dalam melakukan kerja lapangan, peneliti membuat kesimpulan dari tiga sumber: (1) dari hal yang dikatakan orang; (2) dari cara orang bertindak; (3) dari berbagai artefak yang digunakan. Namun dalam buku ini Spradley memfokuskan secara khusus pembuatan kesimpulan dari apa yang dikatakan orang. Wawancara dianggap lebih mampu menjelajah susunan pemikiran masyarakat atau budaya yang sedang diamati. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya organisasi media di *Suaramerdeka.com*.

Pada penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informannya. Dalam hal ini, jumlah informan bisa sedikit tetapi juga bisa banyak, tergantung sampai tercapainya/terjawabnya tujuan penelitian (Kanto dalam Bungin, 2003: 53).

Ketiga, analisis Sociocultural Practice; berasumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi bagaimana wacana muncul dalam media. Konteks di sini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks dari praktik institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau ekonomi media atau budaya atau politik tertentu. Oleh karena itu, ruang redaksi atau wartawan bukanlah profesi yang steril, tetapi sangat ditentukan oleh faktor diluar dirinya.

Sociocultural practice ini tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Untuk studi ini, sebuah teks *blaming the victim* berarti merepresentasikan ideologi patriarkal yang ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Fairclough memaparkan tiga level analisis pada *sociocultural practice*, di antaranya: (1) *Level Situasional* tentang bagaimana teks diproduksi dengan memperhatikan aspek situasional ketika teks tersebut diproduksi. Teks berita dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas dan unik; (2) *Level Institusional* yang melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dari dalam diri media sendiri, bisa juga berasal dari kekuatan eksternal di luar media yang menentukan proses produksi berita. Produksi berita di media saat ini tidak mungkin terlepas dari tiga masalah ekonomi media yang bisa berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. *Pertama*, pengiklan yang menentukan kelangsungan hidup media. *Kedua*, khalayak pembaca yang dalam industri modern ditunjukkan dengan data-data seperti oplah atau *rating*. *Ketiga*, persaingan antarmedia; (3) *Level Sosial*; Fairclough menegaskan wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh perubahan masyarakat. Apabila aspek situasional lebih mengarah pada waktu atau suasana yang mikro (konteks peristiwa saat teks berita kekerasan dibuat), aspek sosial lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem itu menentukan siapa yang berkuasa, nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat serta bagaimana nilai dan kelompok yang berkuasa itu memengaruhi dan menentukan industri media. Misalnya, masyarakat yang kental ideologi patriarkal melihat perempuan sebagai kelas kedua di bawah laki-laki, nilai-nilai ini akan turut mempengaruhi isi pemberitaan media. Adapun teknik analisis data dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Teknik Analisis Data Fairclough

Level	Jenis	Teknik Analisis Data
Mikro	Primer	Analisis isi kuantitatif berita <i>blaming the victim</i> di <i>suaramerdeka.com</i> Analisis teks dengan Framing Model Entman yang meliputi <i>defined problems</i> (pendefinisian masalah), <i>diagnose cause</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah), <i>make moral judgement</i> (membuat keputusan moral), <i>suggest remedies</i> (menekankan penyelesaian) yakni pengungkapan <i>treatment</i> yang diberikan media terhadap korban.
	Sekunder	Analisis data legal tentang panduan penulisan berita di <i>Suaramerdeka.com</i>
Meso (<i>Discourse Practice</i>)	Primer	Mengamati proses produksi teks <i>blaming the victim</i> . Wawancara dengan Pemimpin Redaksi dan Redaktur pelaksana di <i>Suaramerdeka.com</i> kemudian dilakukan reduksi data penelitian kualitatif model Spardley.
	Sekunder	Analisis Data legal perusahaan dari bidang redaksi yang terkait dengan penelitian.
Makro (<i>Sociocultural Practice</i>)	Primer	Analisis kultur patriarki yang membenarkan pelanggaran pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan pemerintah pada berita <i>blaming the victim</i> .
	Sekunder	Analisis kualitatif kebijakan eksternal melalui dokumentasi kepustakaan mengenai artikel atau data-data yang relevan dengan topik penelitian; Analisis sosio-budaya diharapkan mampu membongkar relasi kekuasaan yang mendasari kemunculan dan keberlangsungan wacana tertentu, pengaruh ideologi yang mungkin terjadi pada wacana tersebut.

1.9. Kualitas Penelitian

Guba & Lincoln (dalam Denzin dan Lincoln, 2005: 196) mengevaluasi sebuah penelitian kualitatif dari paradigma kritis bisa dilihat dari kriteria *goodness* atau *quality*. Dalam paradigma kritis, kriteria yang digunakan adalah; pemberian konteks historis (*historical situadness*); pengikisan kebodohan/ketidaktahuan atau salah pengertian (*erosion of ignorance and misapprehension*); serta merangsang tindakan (*action stimulus*).

Pada penelitian ini, untuk mengukur *goodness of quality* maka diajukan *historical situadness*, yaitu tidak mengabaikan konteks historis, politik-ekonomi serta sosial-budaya yang melatarbelakangi.

Goodness Criteria yang mewakili kredibilitas penelitian ini adalah penempatan *historical situadness* sebagai bagian dari upaya untuk menjelaskan struktur dominasi patriarki dalam industri media yang memengaruhi kebijakan industri media dalam proses penayangan berita *blaming the victim*.

Penelitian menempatkan proses produksi relasi kuasa melalui dominasi diskriminatif bahasa dalam surat kabar online lokal di Jawa Tengah dalam konteks historis yang menunjukkan terdapat berita *blaming the victim*. Konteks historis yang kental budaya patriarki kemudian dipertanyakan ketika terdapat pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerkosaan merupakan kejahatan luar biasa dan diperlukan upaya membela korban dengan cara menghukum pelaku seberat-beratnya. Merujuk pada pernyataan presiden tersebut, seharusnya upaya membela korban juga dilakukan media massa, tak terkecuali media massa online di Jawa Tengah.

1.10. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini meliputi teori dan metodologi yang digunakan. Teori Strukturasi Gender yang digunakan dalam penelitian ini melihat struktur asimetris dalam relasi gender, sedangkan relasi ras atau etnis tidak dilihat dalam teori ini. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis*. Sebagai penelitian dalam kerangka tradisi kritis, penelitian ini memiliki keterbatasan karena meniadakan interpretasi atau pengalaman sadar individu yang menjalani aktivitas rutin bekerja di perusahaan media massa, sebagaimana yang dilakukan tradisi fenomenologi. Anderson menyatakan, pendekatan fenomenologi menitikberatkan pada pengalaman sadar seseorang (dalam Littlejohn dan Foss, 2008: 38). Tradisi fenomenologi berasumsi bahwa seseorang secara aktif menginterpretasi pengalaman mereka dan memahami dunia dengan pengalaman pribadinya (Littlejohn dan Foss, 2008: 38).